

2022

LAPORAN **AKUNTABILITAS KINERJA**

Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan
Penilaian Kesesuaian - BSN



• **Triningsih Herlinawati**
*Direktur Penguatan
Penerapan Standar dan
Penilaian Kesesuaian*

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja juga merupakan komponen dari prinsip "good governance" yang menjadi persyaratan bagi setiap instansi, dalam upaya mewujudkan visi dan misi Lembaga yang selaras dengan visi dan misi Presiden. Sejalan dengan itu, penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2022 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan Badan Standardisasi Nasional (BSN) kepada semua pihak yang berkepentingan

Laporan Kinerja Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2022 merupakan Laporan Kinerja tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Keputusan Sekretaris Utama BSN Nomor 22/KEP/SESTAMA/11/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan BSN, serta Rencana Strategis BSN Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat dan umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi organisasi dan seluruh Unit Kerja di lingkungan BSN di masa yang akan datang.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Standardisasi Nasional melakukan reorganisasi pada tahun 2019 dan menghasilkan Peraturan BSN No. 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional. Restrukturisasi tersebut menghasilkan empat kedeputian yaitu Kedeputan Pengembangan Standar, Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, Kedeputan Akreditasi dan Kedeputan Standar Nasional Satuan Ukuran. Keempat kedeputian tersebut bersama dengan Sekretaris Utama Lembaga bekerja untuk membentuk infrastruktur mutu yang berkontribusi untuk mendorong daya saing nasional.

Kedeputan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian disokong oleh dua direktorat yaitu Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (SPSPK) dan Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (PPSPK). Kedua direktorat saling bahu membahu untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerapan standar dan penilaian kesesuaian. Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, serta pemenuhan kewajiban internasional di bidang konsultasi dan diseminasi penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

Dalam pelaksanaan tupoksinya, Direktorat Penguatan Penerapan Standar Penilaian Kesesuaian melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja di BSN, seperti unit kerja eselon 2 di lingkup Kedeputan Pengembangan Standar dalam menyiapkan SNI yang dibutuhkan oleh masyarakat dan stakeholders dalam pelaksanaan fasilitasi pelaku usaha dan diseminasi standar dan penilain kesesuaian. Tak terlepas juga peran unit eselon 2 di lingkup Kedeputan Akreditasi maupun Kedeputan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, dalam mendukung ketersediaan skema akreditasi maupun

skema sertifikasi untuk pelaksanaan fasilitasi lembaga penilaian kesesuaian. Demikian juga peran unit eselon 2 di lingkup kesestamaan, dalam mendukung penyiapan infrastruktur sarana dan keungan, termasuk penyiapan SDM SPK yang kompeten dalam pelaksanaan tugasnya

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan 6 (enam) sasaran dan 10 (Sepuluh) indikator kinerja. Sasaran dan indikator kinerja tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan Program Standardisasi Nasional yang diamanatkan kepada Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian.

Tangerang Selatan, Desember 2022

Direktur Penguatan Penerapan Standar
dan Penilaian Kesesuaian



Triningsih Herlinawati

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
<hr/>	
B A B I P E N D A H U L U A N	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	1
I.3 Sumber Daya Manusia	3
I.4 Peran Strategis	5
<hr/>	
B A B II P E R E N C A N A A N K I N E R J A	8
II.1 Perencanaan Strategis	8
II.2 Perjanjian Kinerja	12
<hr/>	
B A B III A K U N T A B I L I T A S K I N E R J A	15
III.1 Capaian kinerja	15
III.2 Capaian Kegiatan	51
III.3 Realisasi Anggaran	52
<hr/>	
B A B IV P E N U T U P	54
LAMPIRAN	56
Perjanjian Kinerja Tahun 2022	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Personel ASN direktorat penguatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian .	5
Tabel 2. Potensi/isu strategis dan permasalahan direktorat penguatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian.....	7
Tabel 3. Tujuan pada renstra direktorat penguatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian tahun 2020-2024.....	10
Tabel 4. Sasaran dan iku tahun 2022 direktorat penguatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian.....	11
Tabel 5. Perjanjian kinerja direktorat penguatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian tahun 2022.....	13
Tabel 6. Perjanjian program dan kegiatan yang termasuk RO (rincian output).....	14
Tabel 7. Pencapaian kinerja direktorat penguatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian tahun 2022.....	16
Tabel 8. Capaian indikator kinerja sasaran 1	17
Tabel 9. Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatnya sni yang diterapkan.....	18
Tabel 10. jumlah sni yang diterapkan	19
Tabel 11. Jumlah organisasi penerap sni sesuai dengan skema akreditasi kan.....	23
Tabel 12. Capaian kinerja sasaran 3.....	25
Tabel 13. Rincian jumlah sni yang diterapkan	26
Tabel 14. Minat menerapkan sni berdasarkan jenis produk yang dihasilkan	28
Tabel 15. Daftar fasilitasi kepada umk dalam penerapan dan sertifikasi sni.....	31
Tabel 16. Daftar organisasi/ industri yang mendapat sertifikat tahun 2022.....	33
Tabel 17. Capaian kinerja sasaran 4.....	35
Tabel 18. 10 laboratorium yang difasilitasi	39
Tabel 19. Lembaga sertifikasi/ lembaga inspeksi yang difasilitasi	41
Tabel 20. Ruang lingkup listing lpk indonesia.....	44
Tabel 21. Capaian kinerja sasaran 5.....	46
Tabel 22. Rekapitulasi survei ikm klt bsn di 5 wilayah 2021 vs 2022.....	49
Tabel 23. Capaian kinerja sasaran 6.....	50
Tabel 24. Realisasi dari rincian output	52
Tabel 25. Pagu dan realisasi anggaran direktorat penguatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian T.A. 2022	53
Tabel 26. Tabel perjanjian kinerja direktorat penguatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian tahun 2022.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 struktur organisasi direktorat penguatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian.....	3
Gambar 3.1 persentase peningkatan produk, sistem, personel, jasa dan proses yang berSNI 18	
Gambar 3.2 pertumbuhan jumlah organisasi penerap sni dari tahun 2016- 2022.....	22
Gambar 3.3 peta sebaran pembinaan penerapan sni bagi umkm dan organisasi/ industri sampai dengan tahun 2022.....	24
Gambar 3.4 sebaran responden	27
Gambar 3.5 survei minat menerapkan sni tahun 2022 per triwulan	28
Gambar 3.6 sebaran organisasi dan industri tersertifikasi sni di 24 provinsi sampai dengan 2022.....	33
Gambar 3.7 jumlah pelaku usaha yang fasilitasi sertifikasi sni 2015-2022	34
Gambar 3.8 peta sebaran lpk dalam mendukung sektor usaha.....	37
Gambar 3.9 peta sebaran lpk dalam mendukung produk unggulan daerah.....	37
Gambar 3.10 peta sebaran fasilitasi lpk th 2022.....	38
Gambar 3.11 survey ikm klt sumatera selatan	47
Gambar 3.12 survey ikm klt riau.....	47
Gambar 3.13 survey ikm klt jawa barat	47
Gambar 3.14 survey ikm klt jawa timur	48
Gambar 3.15 survey ikm klt sulawesi selatan.....	48
Gambar 3.16 grafik perbandingan dan capaian 3 tahun terakhir	50

I.1 Latar Belakang

Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Capaian kinerja Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2022.

I.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, tugas Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian adalah melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan pemenuhan kebijakan internasional di bidang konsultasi dan diseminasi penerapan standard an penilaian kesesuaian.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang diseminasi standar dan penilaian kesesuaian, fasilitasi pelaku usaha dan fasilitasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang diseminasi standar dan penilaian kesesuaian, fasilitasi pelaku usaha dan fasilitasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
3. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang diseminasi standar dan penilaian kesesuaian, fasilitasi pelaku usaha dan fasilitasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian; dan
4. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional bidang diseminasi dan konsultasi penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

Struktur organisasi Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian terdiri atas:

1. Koordinator Kelompok Substansi Diseminasi SPK;
2. Koordinator Kelompok Substansi Fasilitasi Pelaku Usaha;
3. Koordinator Kelompok Substansi Fasilitasi LPK
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Koordinator Kelompok Substansi Diseminasi SPK mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang diseminasi standar dan penilaian kesesuaian, serta penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang diseminasi dan konsultasi penerapan standar dan penilaian kesesuaian. Subdirektorat Diseminasi Standar dan Penilaian Kesesuaian terdiri atas:

- a. Subkoordinator Kelompok Substansi Promosi SPK; dan
- b. Subkoordinator Kelompok Substansi Partisipasi Masyarakat

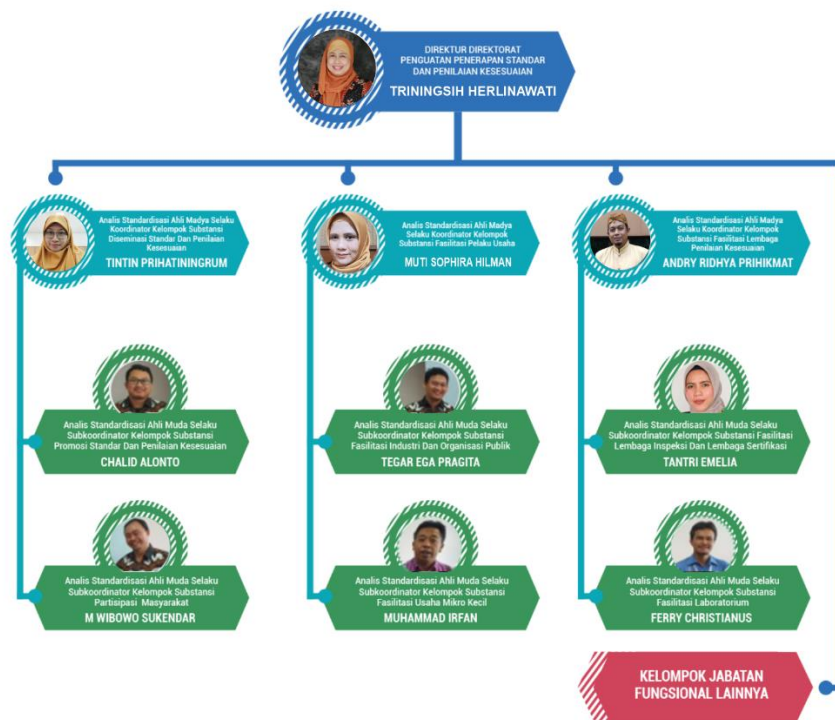
Koordinator Kelompok Substansi Fasilitasi Pelaku Usaha; mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pelaku usaha dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian. Subdirektorat Fasilitasi Pelaku Usaha terdiri atas:

- a. Subkoordinator Kelompok Substansi Fasilitasi Usaha Mikro Kecil; dan
- b. Subkoordinator Kelompok Substansi Fasilitasi Industri Dan Organisasi Publik.

Koordinator Kelompok Substansi Fasilitas LPK mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas lembaga penilaian kesesuaian dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian. Subdirektorat Fasilitas Lembaga Penilaian Kesesuaian terdiri atas:

- a. Subkoordinator Kelompok Substansi Fasilitas Lembaga Inspeksi Dan Lembaga Sertifikasi; dan
- b. Subkoordinator Kelompok Substansi Fasilitas Laboratorium

Struktur Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dapat dilihat pada gambar berikut:



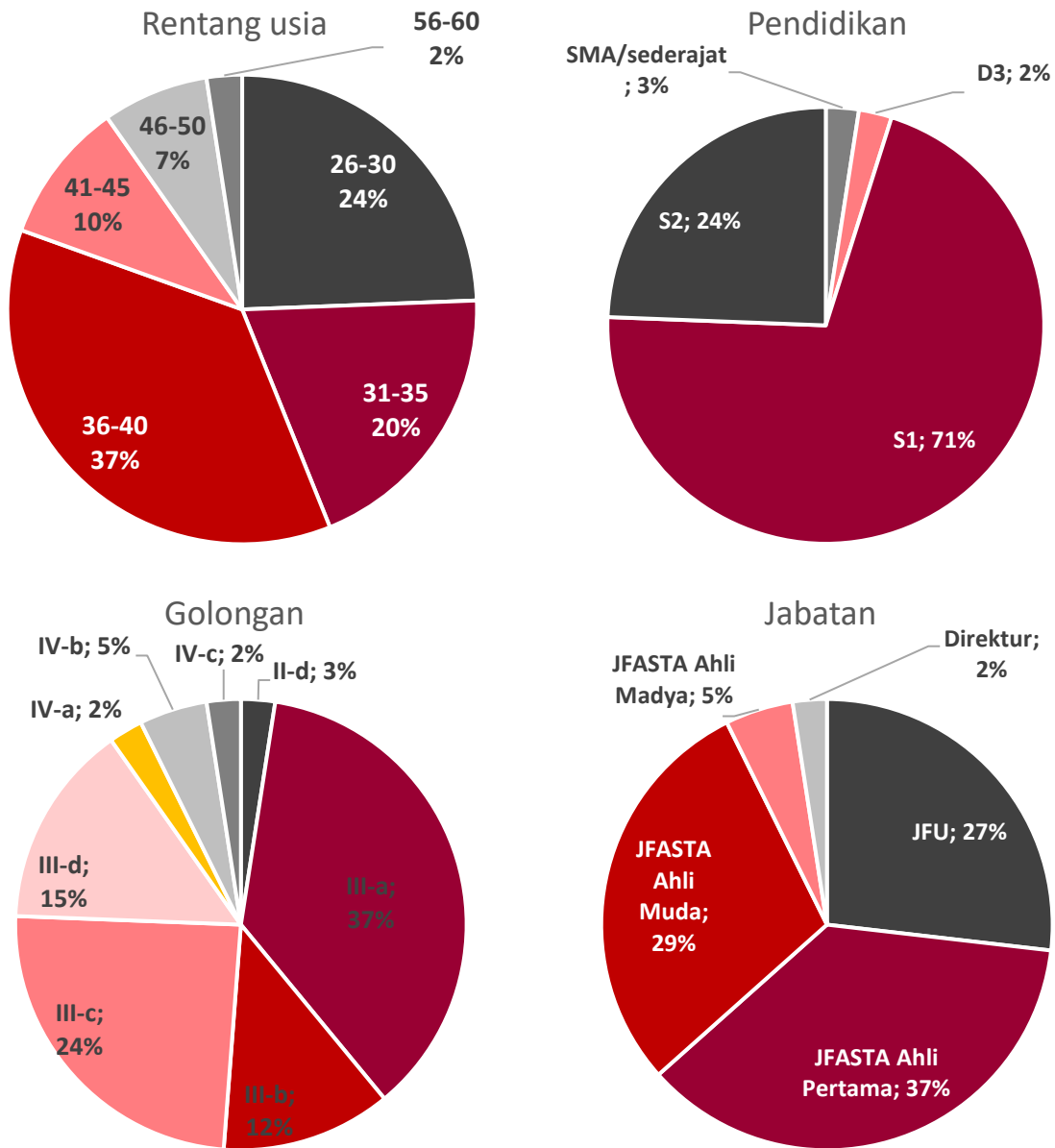
Gambar 1.1 struktur organisasi direktorat penguatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian

Badan Standardisasi Nasional melakukan reorganisasi pada bulan Desember 2020, sebagaimana dikeluarkannya Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional.

1.3 Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2022 Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian memiliki personel berstatus

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 41 (empat puluh satu) orang yang terdiri dari 23 pegawai laki-laki dan 18 pegawai perempuan.



Grafik Pegawai Direktorat PPSPK dalam Angka

No	Uraian	Jenjang Pendidikan			Jumlah Orang
		< S1	S1	S2	
1.	Direktur PPSPK	-	-	1	1
2.	Koordinator Kelompok Substansi Fasilitas Pelaku Usaha	-	-	1	1
3.	Koordinator Kelompok Substansi Diseminasi SPK	-	-	1	1
4.	Koordinator Kelompok Substansi Fasilitas LPK	-	-	1	1
5.	Subkoordinator Kelompok Substansi Fasilitas Usaha Mikro Kecil	-	1	-	1
6.	Subkoordinator Kelompok Substansi Fasilitas Industri Dan Organisasi Publik	-	-	1	1
7.	Subkoordinator Kelompok Substansi Promosi SPK	-	1	-	1
8.	Subkoordinator Kelompok Substansi Partisipasi Masyarakat	-	1	-	1
9.	Subkoordinator Kelompok Substansi Fasilitas Lembaga Inspeksi Dan Lembaga Sertifikasi	-	1	-	1
10.	Subkoordinator Kelompok Substansi Fasilitas Laboratorium	-	1	-	1
11.	Staf	2	23	6	31
Jumlah		2	28	11	41

Tabel 1. Personel ASN direktorat penguatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian

1.4 Peran Strategis

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.

Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu:

1. meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan Pelaku Usaha, serta kemampuan inovasi teknologi
2. meningkatkan perlindungan kepada konsumen, Pelaku Usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup

3. meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri.

Peran Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian bagaimana standar, terutama Standar Nasional Indonesia (SNI) dapat dimanfaatkan/diterapkan oleh stakeholder standardisasi sesuai dengan kebutuhannya sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian tersebut di atas.

Untuk itu, sesuai dengan tugas dan fungsinya Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang telah dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
<p>1. Keinginan pelaku usaha untuk mendapatkan pembinaan dalam penerapan SNI meningkat</p>	<p>1.1. Biaya pendampingan penerapan SNI terbatas</p> <p>1.2. Keterbatasan waktu SDM Pembina penerapan SNI</p> <p>1.3. Ketidaksesuaian KBLI dengan jenis produk pelaku usaha pada proses pendataan Bina UMK</p> <p>1.4 Aplikasi Bina UMK yang dijadikan rujukan UMK untuk mendapat fasilitasi pendampingan belum dapat berfungsi optimal.</p>	<p>1.1.1 Sinergi dengan berbagai pihak untuk membantu pembiayaan sertifikasi</p> <p>1.1.2 Pendekatan kepada lembaga sertifikasi untuk memberikan keringanan biaya untuk UMKM</p> <p>1.2.1 Penguatan Komitmen Pembina pelaku usaha</p> <p>1.3.1 Penyesuaian atau <i>update</i> KBLI pada saat pendampingan penerapan SNI kepada pelaku usaha</p> <p>1.4.1 Koordinasi dengan Unit Internal BSN selaku penanggungjawab pengembangan aplikasi tersebut.</p> <p>1.4.2 Melakukan kontak secara manual kepada pelaku usaha yang terdaftar di dalam aplikasi SNI Bina UMK meskipun tidak efektif karena</p>

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
		jumlah penambahan data peminat SNI Bina UMK sangat banyak.
2. Pembina UMKM di Indonesia cukup banyak tersebar di beberapa wilayah	Masih sedikitnya pembina UMKM yang memiliki pengetahuan/ keahlian/ pengalaman dalam mendampingi UMKM dalam menerapkan SNI	2.1.1.Peningkatan kompetensi (capacity building) Pembina UMKM dalam menerapkan SNI melalui training/ magang/ e-learning, dll 2.1.2. Memperluas jaringan Pembina / Membuat forum Fasilitator SNI 2.1.3. Memperbanyak pembina pelaku usaha khususnya di daerah
3. Produk ber-SNI yang beredar di masyarakat semakin meningkat jumlahnya	3.1. Kesadaran masyarakat dalam memilih produk ber-SNI masih rendah	3.1.1. Melakukan diseminasi SPK secara luas ke berbagai segmen masyarakat melalui berbagai media dan metode komunikasi
4. Kebutuhan LPK untuk mendukung produk ber-SNI semakin meningkat	4.1. Terbatasnya lingkup LPK untuk mendukung produk ber-SNI 4.2. belum meratanya sebaran LPK di seluruh Indonesia	4.1.1. Melakukan sosialisasi/ bimbingan teknis penyiapan LPK yang mendukung penerapan SNI untuk dapat diakreditasi 4.1.2. Kerjasama dengan Direktorat SPSPK dalam upaya penunjukan LPK untuk menambah ruang lingkup sesuai kebutuhan 4.2.1. Mendorong berkembangnya LPK di daerah/Kawasan yang belum tersedia untuk mendukung pengembangan produk unggulan daerah

Tabel 2. Potensi/isu strategis dan permasalahan direktorat penguatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 Perencanaan Strategis

II.1.1 Visi dan Misi

Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan pemerintah Republik Indonesia yang harus bekerja secara bersama-sama dan saling bersinergi dengan seluruh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga (K/L) hanya memiliki 1 (satu) visi, yaitu visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Hal ini berarti bahwa visi BSN harus selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia, sehingga visi BSN sebagaimana yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



VISI

Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Secara umum, visi ini bermakna bahwa 5 (lima) tahun ke depan, semua upaya strategis yang dilakukan BSN harus bermuara untuk menggerakkan sektor pembangunan nasional melalui penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian secara komprehensif dan terintegrasi untuk menciptakan produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global sehingga dapat turut serta dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri.

Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun (2020-2024) yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam konteks standarisasi dan penilaian kesesuaian, BSN berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing. Oleh karena itu, misi Badan Standardisasi Nasional yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 yaitu:



MISI

“Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian”

Pengelolaan standarisasi dan penilaian kesesuaian ini meliputi tahapan :

1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan,
2. Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara komprehensif dan menyeluruh,
3. Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparialitas serta keberterimaan global.
4. Mengelola standar nasional satuan ukuran untuk menjamin ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional.
5. Mengelola sumber daya manusia di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian berbasis modal manusia.
6. Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai roadmap reformasi birokrasi nasional.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Tujuan Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mengacu pada tujuan pada Renstra Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2020-2024 yang telah selaras dengan Tujuan BSN di Renstra BSN 2020-2024 yaitu Terwujudnya produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global adalah sebagai berikut:

Tujuan	Indikator Tujuan
Peningkatan Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	1. Jumlah Produk yang memenuhi SNI 2. Jumlah SNI yang diterapkan (akumulatif)

Tabel 3. Tujuan pada renstra direktorat penguatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian tahun 2020-2024

Sasaran disini merupakan sasaran di lingkungan Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian. selaku Unit Teknis di lingkungan BSN. Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja *outcome*.

Sasaran Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mengacu pada sasaran yang tertuang dalam Renstra Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2020-2024 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan BSN adalah sebagai berikut:

SASARAN

Sasaran Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian sesuai Renstra Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2020-2024 dan IKU di lingkungan BSN terkait Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Tabel 4. Sasaran dan iku tahun 2022 direktorat penguatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian

Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)
Meningkatnya produk, sistem, personel, jasa, dan proses sesuai dengan SNI	Persentase peningkatan produk, sistem, personel, jasa dan proses yang berSNI
Meningkatnya SNI yang diterapkan	<ul style="list-style-type: none"> ● Persentase SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha , organisasi dan LPK ● Persentase pertumbuhan SNI yang diterapkan
Meningkatnya penerapan standar dan penilaian kesesuaian	<ul style="list-style-type: none"> ● Persentase stakeholder yang menerapkan SNI ● Persentase pelaku usaha binaan yang menjadi role model
Meningkatnya ketersediaan LPK	<ul style="list-style-type: none"> ● Rasio LPK terhadap sektor Usaha ● Rasio LPK terhadap Produk Unggulan daerah
Meningkatnya Kualitas Layanan SPK di wilayah KLT	<ul style="list-style-type: none"> ● Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di wilayah KLT ● Persentase KLT dengan IK minimal 3
Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran	Persentase realisasi anggaran Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

II.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2022 yang telah selaras dengan IKU di lingkungan BSN terkait Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022
Meningkatnya produk, sistem, personel, jasa, dan proses sesuai dengan SNI	Persentase peningkatan produk, sistem, personel, jasa dan proses yang berSNI	12%
Meningkatnya SNI yang diterapkan	• Persentase SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha , organisasi dan LPK	50%
	• Persentase pertumbuhan SNI yang diterapkan	20%
Meningkatnya penerapan standar dan penilaian kesesuaian	• Persentase stakeholder yang menerapkan SNI	50%
	• Persentase pelaku usaha binaan yang menjadi role model	30%
Meningkatnya ketersediaan LPK	• Rasio LPK terhadap sektor Usaha	0.51
	• Rasio LPK terhadap Produk Unggulan daerah	0.6
	• Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di wilayah KLT	3.6

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022
Meningkatnya Kualitas Layanan SPK di wilayah KLT	<ul style="list-style-type: none"> Persentase KLT dengan IK minimal 3 	80%
Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran	Persentase realisasi anggaran Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	100%

Tabel 5. Perjanjian kinerja direktorat penguatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian tahun 2022

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian pada tahun 2022 menetapkan sebanyak 6 (Enam) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian melaksanakan 1 (satu) kegiatan dalam 1 (satu) program dengan anggaran sebesar Rp 7.100.500.000,-. Namun demikian, pagu tersebut mengalami dua kali *Automatic Adjustment* belanja Kementerian/Lembaga TA 2022 sehingga pagu anggaran akhir Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Rp 5.613.387.000,-.

Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk RO (Rincian Output) yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

3558	Peningkatan Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian
3558.AEB	Forum
3558.AEB.001	Sidang ISO Devco
3558.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi
3558.AEF.001	Promosi Standar dan Penilaian Kesesuaian
3558.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
3558.BDB.001	Kesekretariatan DB JSCEEE
3558.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
3558.BDD.001	Bimbingan Teknis kepada Kelompok Masyarakat

3558.BDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha
3558.BDH.001	Bimbingan teknis kepada Badan Usaha
3558.PEF	Sosialisasi dan Diseminasi
3558.PEF.001	Sosialisasi kepada Penerap Standar Nasional Indonesia
3558.QAH	Pelayanan Publik Lainnya
3558.QAH.001	Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Surabaya
3558.QAH.003	Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Jawa Barat
3558.QAH.005	Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Riau
3558.QAH.007	Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Palembang
3558.QAH.009	Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Makassar
3558.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
3558.QDB.001	Bimbingan teknis kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian
3558.QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM
3558.QDG.001	Bimbingan teknis kepada UMKM

Tabel 6. Perjanjian program dan kegiatan yang termasuk RO (rincian output)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



kuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2022.

III.1 Capaian kinerja

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk mewujudkan visi dan misi Lembaga yang mendukung visi dan misi presiden, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian yang direncanakan dalam Tahun 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian*)
Meningkatnya produk, sistem, personel, jasa, dan proses sesuai dengan SNI	Persentase peningkatan produk, sistem, personel, jasa dan proses yang berSNI	12%	16%	130%
Meningkatnya SNI yang diterapkan	• Persentase SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha , organisasi dan LPK	50%	50%	100%
	• Persentase pertumbuhan SNI yang diterapkan	20%	20%	100%
Meningkatnya penerapan standar dan penilaian kesesuaian	• Persentase stakeholder yang menerapkan SNI	50%	78,48%	157%
	• Persentase pelaku usaha binaan yang menjadi role model	30%	27%	90%
Meningkatnya ketersediaan LPK	• Rasio LPK terhadap sektor Usaha	0.51	0,71	139 %
	• Rasio LPK terhadap Produk Unggulan daerah	0.6	0.87	147 %
Meningkatnya Kualitas Layanan SPK di wilayah KLT	• Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di wilayah KLT	3.6	3.73	103,6%
	• Persentase KLT dengan IK minimal 3	100	100	100%
Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran	Persentase realisasi anggaran Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	100%	98,19 %	98,2%
Rata-rata capaian Tahun 2022				116,5%

Tabel 7. Pencapaian kinerja direktorat penguatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pencapaian kinerja tersebut dijelaskan sebagai berikut :

**SASARAN
I**

Meningkatnya produk, sistem, personel, jasa, dan proses sesuai dengan SNI

Dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya produk, sistem, personel, jasa, dan proses sesuai dengan SNI, Direktorat PPSPK memiliki indikator kinerja persentase peningkatan produk, sistem, personel, jasa dan proses yang berSNI. Berikut merupakan capaian indikator kinerja sasaran 1.

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian 2022			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2021	Target	Realiasi	% *)	Target	Capaian
1. <i>Persentase peningkatan produk, sistem, personel, jasa dan proses yang berSNI</i>	%	10%	12%	16%	130%	17%	94,12%

Tabel 8. Capaian indikator kinerja sasaran 1

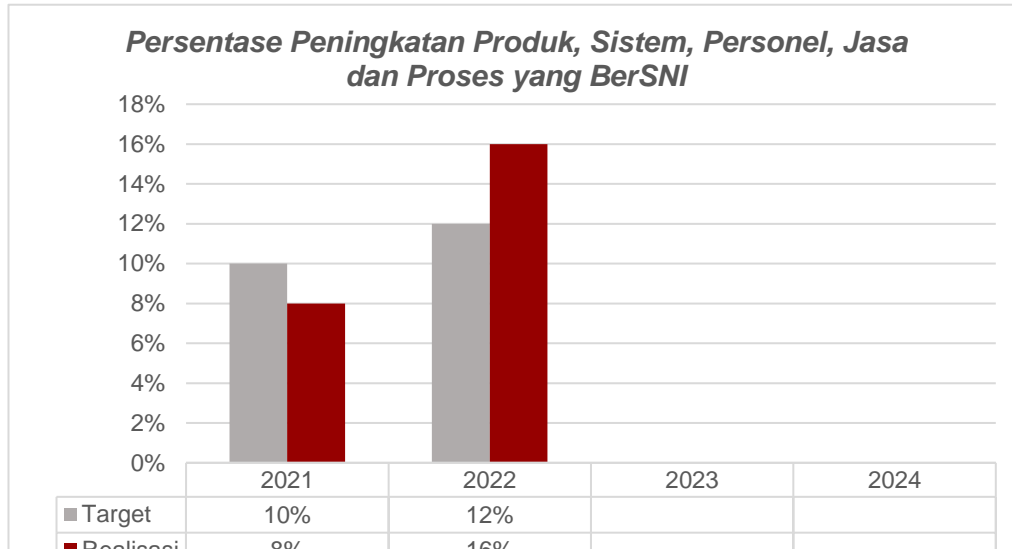
*) Kenaikan Tahun 2022 terhadap tahun 2021

Sasaran meningkatnya produk, sistem, personel, jasa, dan proses sesuai dengan SNI terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator tersebut sebesar 130%. Capaian indikator ini pada tahun 2022 adalah 130%, dimana target kenaikannya 12% dari tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar 16%. Untuk target capaian indicator kinerja Persentase peningkatan produk, sistem, personel, jasa dan proses yang berSNI berdasarkan Rencana Strategis di tahun 2024 yaitu sebanyak 17%.

Untuk menghitung presentasi capaian indicator tersebut, dapat menggunakan rumusan sebagai berikut :

- Identifikasi jumlah produk, sistem, personel, jasa, dan proses yang ber-SNI (tahun n)
- Identifikasi jumlah produk, sistem, personel, jasa, dan proses yang ber-SNI (tahun n-1)
-

$$\frac{\sum \text{PSPJP yg ber SNI (n)} - \sum \text{PSPJP yg ber SNI (n-1)}}{\sum \text{PSPJP yg ber SNI (n-1)}} \times 100\%$$



GAMBAR 3.1 persentase peningkatan produk, sistem, personel, jasa dan proses yang berSNI

Perbandingan Target dan Realisasi Untuk Indikator Kinerja Meningkatnya Produk, Sistem, Personel, Jasa, dan Proses Sesuai Dengan SNI Tahun 2021 dan 2022.

SASARAN II **Meningkatnya SNI yang diterapkan**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Capaian 2022			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2021	Target	Realisasi	% *)	Target 2024	% capaian
1. <i>Persentase SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, organisasi dan LPK</i>	%	-	50 %	50%	100%	60%	83,3 %
2. <i>Persentase pertumbuhan SNI yang diterapkan</i>	%	-	20%	20%	100%	30%	66,6%

Tabel 9. Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatnya sni yang diterapkan

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran **Meningkatnya SNI yang diterapkan untuk daya saing produk, penetrasi pasar dan perlindungan masyarakat dari aspek K3L** terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Persentase SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, organisasi dan LPK. Perhitungan presentase berdasarkan rumus berikut.

$$\frac{\Sigma \text{ SNI yang telah diterapkan}}{\Sigma \text{ Total SNI yang berlaku}} \times 100\%$$

- **SNI yang diterapkan** adalah SNI barang, jasa, proses, dan sistem, personal dan SNI terkait Penilaian kesesuaian
- **Penerapan SNI** adalah kegiatan menerapkan persyaratan SNI terhadap barang, jasa, sistem, proses, atau personal dengan mempertimbangkan sektor Prioritas Nasional dalam RPJMN
- **Jumlah SNI terkait** barang, jasa, proses, dan sistem, personal dan penilaian kesesuaian yang berlaku (aktif) sebanyak 9336 SNI, SNI yang diterapkan sebanyak 4703, sehingga capaian untuk indikator kinerja ini adalah 50%.
- **Perbandingan target kinerja 50% SNI diterapkan dengan capaian kinerja yaitu 100%**

No	SNI	Jumlah	Diterapkan	%
1	Barang/Jasa/Sistem/Proses/personel	6936	2461	35,5
2	Sistem manajemen dan Penilaian Kesesuaian	2461	2242	91,1
	Jumlah Total	9397	4703	50

Tabel 10. **JUMLAH SNI YANG DITERAPKAN**

Berdasarkan hasil capaian, beberapa upaya sudah dilakukan oleh BSN agar SNI yang ditetapkan BSN dapat diterapkan oleh pelaku usaha. Upaya tersebut antara lain diseminasi SNI yang terus menerus dan masif kepada pelaku usaha, mengkomunikasikan kebutuhan SNI kepada produsen atau pelaku usaha lain, sehingga SNI yang ditetapkan memang sudah sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Untuk peningkatan kinerja ke depan, BSN akan meningkatkan kegiatan pembinaan penerapan SNI, melalui program SNI Bina UMK berbasis OSS yang diharapkan akan semakin banyak SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha.

Untuk meningkatkan penerapan SNI, maka SNI yang dikembangkan harus sesuai dengan kebutuhan stakeholder. Prinsip-prinsip penerapan SNI menjadi perhatian penting di unit BSN yang bertugas merumuskan SNI. Penerapan SNI perlu didukung sistem dan infrastruktur penilaian kesesuaian, seperti skema penilaian kesesuaian, dan lembaga penilaian kesesuaian yang kompeten yang dibuktikan dengan pengakuan akreditasi. Pembinaan kepada LPK perlu dilakukan agar LPK memenuhi persyaratan akreditasi. Fasilitasi kepada para pelaku usaha baik, UMKM, organisasi dan industri disesuaikan dengan kemampuan yang memadai dalam menerapkan SNI. SNI perlu didiseminasikan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kesadarannya bahwa penerapan SNI dapat meningkatkan kualitas produk, memenuhi persyaratan dalam aspek keamanan, keselamatan dan Kesehatan serta kelestarian lingkungan. Masyarakat/konsumen perlu diberikan sosialisasi agar meningkatkan kesadarannya dalam memilih produk yang dibeli, mengkonsumsi atau menggunakan produk sesuai dengan SNI. Dalam konteks memperkuat penerapan SNI, Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian melakukan diseminasi antara lain dengan sosialisasi dan promosi serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penerapan SNI; fasilitasi pelaku usaha; dan fasilitasi lembaga penilaian kesesuaian.

Oleh karenanya, upaya perbaikan kedepan yang perlu dilakukan agar penerapan SNI menjadi semakin meningkat antara lain:

- Memperkuat *partnership* yang dilakukan dengan metode *appreciative inquiry* agar dapat meningkatkan minat untuk menerapkan SNI dan memilih produk ber SNI, serta metode problem solving dengan memberikan wawasan pentingnya SPK melalui penyuluh dan *opinion leader*.
- Memperkuat sistem fasilitasi penerapan SNI pada pelaku usaha, industri, maupun organisasi. Sejalan dengan kebijakan SNI Bina UMK, penguatan yang perlu dilakukan antara lain meningkatkan kualitas dan kuantitas Pembina melalui ToT dan *partnership* sinergi, terutama Pembina dari kementerian/lembaga dan daerah, relawan dan universitas melalui program MBKM, serta perbaikan aplikasi SNI Bina UMK (<https://binaumk.bsn.go.id/>) yang dikembangkan dan dikelola oleh BSN melalui perbaikan yang tersistem sehingga menampilkan data yang akurat, *real time*, dan berjalannya seluruh fungsi/ modul dengan baik dan

sistematis sesuai alur proses yang ditetapkan.

- Memperkuat fasilitasi LPK dengan penekanan pada dukungan ruang lingkup serta sebaran lokasi LPK pada daerah yang dukungannya masih rendah. Pengembangan LPK mempertimbangkan pada Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) terkait sektor usaha dan produk unggulan daerah di masing-masing provinsi. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan, Kawasan Indonesia Timur perlu menjadi perhatian. Untuk itu pemerintah daerah perlu dilibatkan untuk sinergi penumbuhan dan pembinaan LPK untuk meningkatkan daya saing produk unggulan daerah.

Untuk terwujudnya capaian indikator kinerja Persentase SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, organisasi dan LPK, Indikator Kinerja Persentase pertumbuhan SNI yang diterapkan, serta terwujudnya sasaran Meningkatnya SNI yang diterapkan, Direktorat PPSPK perlu ~~harus~~ melakukan diseminasi secara meluas atas SNI yang telah ditetapkan dengan melakukan terlebih dahulu segmentasi dan menentukan target yang diharapkan sesuai dengan pengguna SNI nya. Diseminasi tidak hanya dilakukan ke media sosial, tapi lebih menasar ke pelaku usaha, organisasi atau LPK sesuai dengan siapa pengguna SNI tersebut. Dengan membangun kesadaran pelaku usaha akan pentingnya SNI diharapkan akan lebih banyak lagi SNI yang diterapkan oleh pengguna. Disamping itu juga perlu dilakukan pendampingan penerapan SNI kepada pelaku usaha baik untuk SNI sistem, personel, barang, jasa dan proses.

Pada tahun 2021, jumlah penerap produk, sistem, personel, jasa, dan proses sesuai dengan SNI berjumlah 39.048 organisasi sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi 99.266 organisasi. Berikut adalah grafik terkait perkembangan jumlah penerap SNI pada tahun 2016 - 2022.



Gambar 3.2 pertumbuhan jumlah organisasi penerap sni dari tahun 2016- 2022

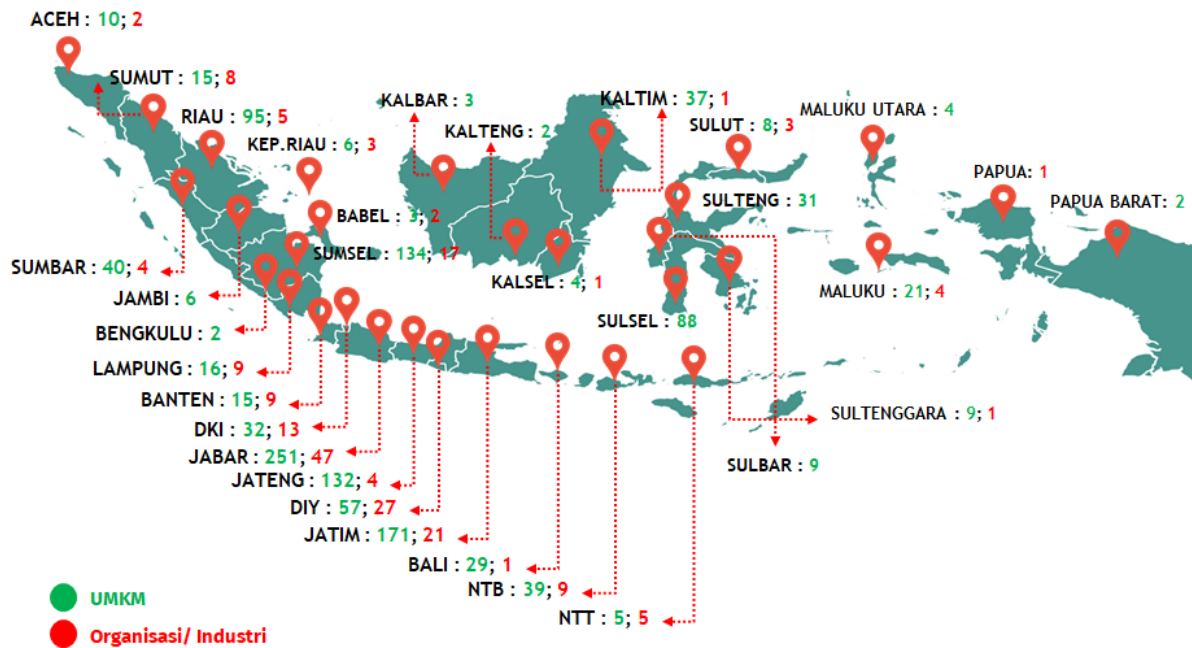
Berdasarkan gambar 3.2 tersebut, terlihat kenaikan yang signifikan para penerap SNI ditahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2022, dimana terdapat kenaikan angka capaian sebesar 154%.

Jika dilihat dari ragam SNI yang diterapkan oleh para pelaku usaha, terdapat mayoritas 23 kategori SNI yang diterapkan oleh para pelaku usaha. Peningkatan jumlah penerap SNI terbanyak yaitu pada SNI ISO 37001:2016 – Sistem Manajemen Anti Penyuapan yaitu sebesar 419 pelaku usaha. Secara detail jumlah organisasi penerap SNI sesuai dengan skema akreditasi disajikan di dalam Tabel 11.

No	Organisasi/pelaku usaha	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Penerap SNI Produk	2982	3082	1560	2221	10.345	10474	10782
2	Penerap standar pertanian organik	355	319	288	316	596	567	584
3	Penerap standar jaminan produk halal	-	-	3314	3270	10.300	14972	76
4	Penerap standar sistem manajemen lingkungan (SNI ISO 14001)	438	775	650	1944	804	831	1134
5	Penerap pengelolaan hutan produksi lestari	-	-	223	251	288	288	289
6	Penerap standar ekolabel	7	7	9	8	9	9	9
7	Penerap standar Gas Rumah Kaca	-	-	5	5	5	4	6
8	Penerap standar Sistem Manajemen Energi	-	-	6	57	35	35	36
9	Penerap standar Verifikasi Legalitas Kayu	-	-	2257	2941	3.047	3.051	3.143
10	Penerap standar system manajemen mutu (SNI ISO 9001)	5990	5691	4961	5714	4.635	4.473	4.588
11	Penerap system manajemen keamanan pangan (SNI ISO 22001)	196	198	198	380	235	288	321
12	Penerap system Hazzard Analytical Critical Control Point (HACCP)	91	157	171	225	244	244	272
13	Penerap Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SNI ISO 27001)	39	113	88	163	386	420	605
14	Penerap Sistem Manajemen Alat Kesehatan	10	11	17	33	36	40	19
15	Penerap Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SNI ISO 37001)	-	-	72	96	255	360	779
16	Penerap Sistem Manajemen Keamanan Rantai Pasokan (SNI ISO 28001)	-	-	-	2	5	5	5
17	Penerap standar Usaha Pariwisata	-	-	-	1801	1.279	2.572	2.649
18	Penerap Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium	-	-	-	1	1	2	4
19	Penerap Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	-	-	-	71	51	62	62
20	Penerap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh	-	-	-	-	172	364	422
21	Penerap Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan	-	-	-	-	-	3	17
22	Penerap Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (ISPO)	-	-	-	-	-	736	758
23	Penerap standar untuk Personel	-	-	-	-	-	-	72706
TOTAL		10.108	10.353	13.819	19.398	32.728	39.048	99.266

Tabel 11. Jumlah organisasi penerap sni sesuai dengan skema akreditasi kan

Meningkatnya jumlah organisasi penerap SNI, merupakan salah satu bentuk nyata dari kegiatan yang dilakukan di Kedeputusan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, termasuk peran Direktorat PPSPK dalam hal ini. Sesuai dengan amanah UU No 20 tahun 2014, BSN melakukan pembinaan penerapan SNI kepada pelaku usaha dan masyarakat. Setiap tahun para pelaku usaha baik itu organisasi maupun usaha mikro kecil yang mendapatkan pembinaan penerapan SNI semakin meningkat jumlahnya, disamping itu kebutuhan pelaku usaha untuk meningkatkan daya saingnya melalui penerapan SNI juga semakin meningkat. Gambar berikut ini menunjukkan peta sebaran jumlah pembinaan penerapan SNI yang dilakukan oleh Direktorat PPSPK baik untuk pelaku usaha UMKM maupun organisasi/ industri Tahun 2022 yang tersebar di 32 Provinsi.



Gambar 3.3 peta sebaran pembinaan penerapan sni bagi umkm dan organisasi/ industri sampai dengan tahun 2022

Dalam rangka mewujudkan capaian indikator kinerja mengalami peningkatan persentase baik produk, sistem, personel, jasa dan proses yang berSNI sesuai dengan target yang diharapkan di tahun selanjutnya. Selain peningkatan kegiatan pendampingan penerapan SNI kepada para pelaku usaha, juga perlu upaya peningkatan kegiatan diseminasi dalam memperluas penerapan SNI produk, sistem, personel, jasa dan sebaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) terutama di wilayah Indonesia bagian Timur-

**SASARAN
III**

Meningkatnya penerapan standar dan penilaian kesesuaian

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatkan penerapan standar dan penilaian kesesuaian terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu persentase stakeholder yang menerapkan SNI dan persentase pelaku usaha binaan yang menjadi *role model*.

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian 2022			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)
		2021	Target	Realisasi	% *)	Target 2024
1. <i>Persentase SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, organisasi dan LPK</i>	%	40%	50%	50%	100%	60%
2. <i>Persentase pertumbuhan SNI yang diterapkan</i>	%	15%	20%	20%	100%	30%

Tabel 12. Capaian kinerja sasaran 3

Untuk menghitung capaian kinerja ini dapat dilakukan dengan formula, sebagai berikut :

- Identifikasi jumlah responden yang menerapkan SNI
- Identifikasi total responden

$$\frac{\sum \text{Responden yang menerapkan SNI}}{\sum \text{Total responden}} \times 100\%$$

Capaian kinerja untuk indikator kinerja *persentase SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, organisasi dan LPK* sebesar 100% jika dibandingkan terhadap target tahun berjalan (2022), atau 50% dari target capaian kinerja tahun 2024. Secara riil 2022, penerapan SNI sebanyak 7.204 SNI, dimana jumlah SNI sebagai *baseline* pada Renstra 2020-2024 yaitu sebanyak 14.339 SNI. Dengan kata lain, persentase SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, organisasi dan LPK yaitu sebesar 50,24%.

untuk indikator kinerja *persentase pertumbuhan SNI yang diterapkan* dihitung dari penambahan jumlah SNI yang diterapkan di tahun 2022 terhadap pencapaian penerapan SNI di tahun 2021. Untuk di tahun 2022, jumlah SNI yang diterapkan 7.204 SNI sedangkan tahun 2021 yaitu sebanyak 4.362 SNI, sehingga capaian kinerja untuk indikator *Persentase pertumbuhan SNI yang diterapkan* sebesar 65,15%. Rincian jumlah SNI yang diterapkan di tahun 2022 ditunjukkan pada Tabel

13. Rincian Jumlah SNI Yang Diterapkan

No	Sumber data	Jumlah
----	-------------	--------

1	SNI Penyusunan Skema Akreditasi	424
2	SNI Lingkup Akreditasi LSPro	1.224
3	SNI Lingkup LSPro Penunjukan	23
4	SNI dipakai K/L	501
5	SNI yang digunakan untuk fasilitasi LPK	8
6	SNI Award	165
7	SNI Lingkup Akreditasi Laboratorium	1.716
8	SNI dari SPPT SNI aplikasi bang Beni	424
9	SNI Bina UMK	670
10	SNI Sistem Manajemen dan PK	50
11	SNI wajib sektor kelistrikan	2.000
Jumlah SNI diterapkan		7.204

Tabel 13. Rincian jumlah sni yang diterapkan

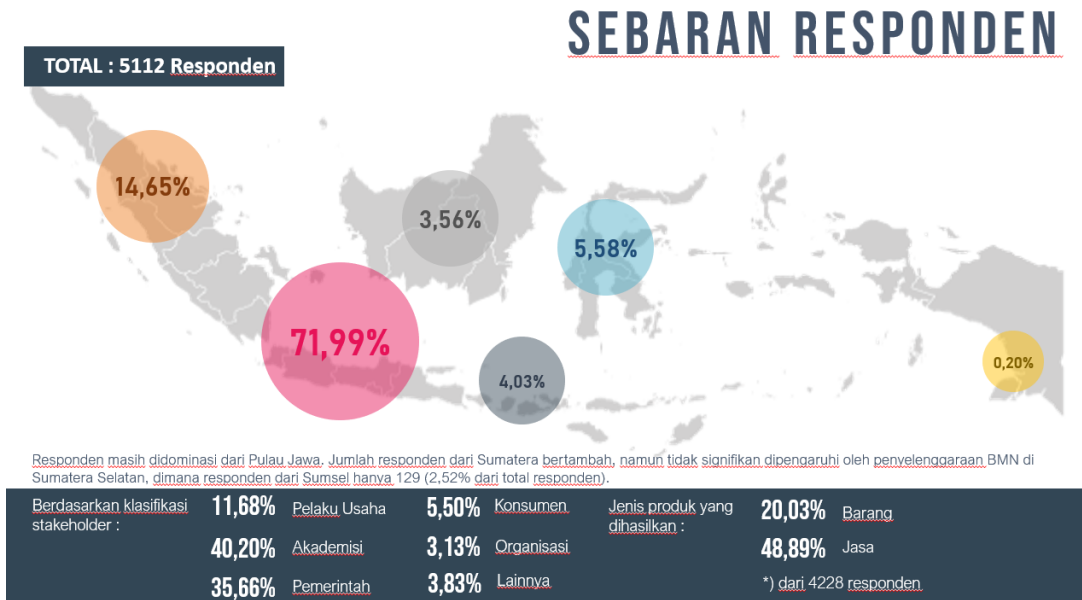
Faktor penentu keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh seluruh proses dalam SPK, baik pengembangan SNI, sosialisasi SPK, sistem dan fasilitasi penerapan standar, penyediaan infrastruktur penilaian kesesuaian, promosi SNI dan produk ber-SNI. Untuk mendapatkan capaian yang optimal, maka diperlukan sinergitas dengan pihak terkait menjadi penting, tidak saja unit kerja di internal BSN, melainkan juga *stakeholder* SPK, yang diantaranya adalah Kementerian / Lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha / BUMN / BUMD / swasta, para pakar, dan konsumen.

Untuk meningkatkan penerapan SNI, maka SNI yang dikembangkan harus merupakan kebutuhan *stakeholder*. Penerapan SNI perlu didukung dengan adanya sistem dan infrastruktur penunjang, seperti skema penilaian kesesuaian, dan LPK yang kompeten. Pembinaan kepada LPK perlu dilakukan agar LPK memenuhi persyaratan akreditasi. Fasilitasi kepada para pelaku usaha baik, UMKM, organisasi dan industri dilakukan dengan kemampuan yang memadai dalam menerapkan SNI. Dengan membangun kesadaran pelaku usaha akan pentingnya SNI diharapkan akan lebih banyak lagi SNI yang diterapkan.

Presentase Stakeholder yang Menerapkan SNI

Capaian kinerja ini diukur dengan melakukan pengambilan data dari survei tahunan pada stakeholder yang mengikuti kegiatan yang dilakukan BSN, baik sosialisasi, webinar dan kegiatan lainnya yang dilakukan baik secara daring maupun luring. Adapun bukti realisasi/pemenuhannya berupa Laporan

hasil survei stakeholder yang menerapkan SNI. Survei dilakukan sepanjang tahun dan dilakukan monitoring perhitungan per triwulan. Kuesioner disebar dan telah melibatkan 5112 responden yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia dengan sebaran sebagai berikut.



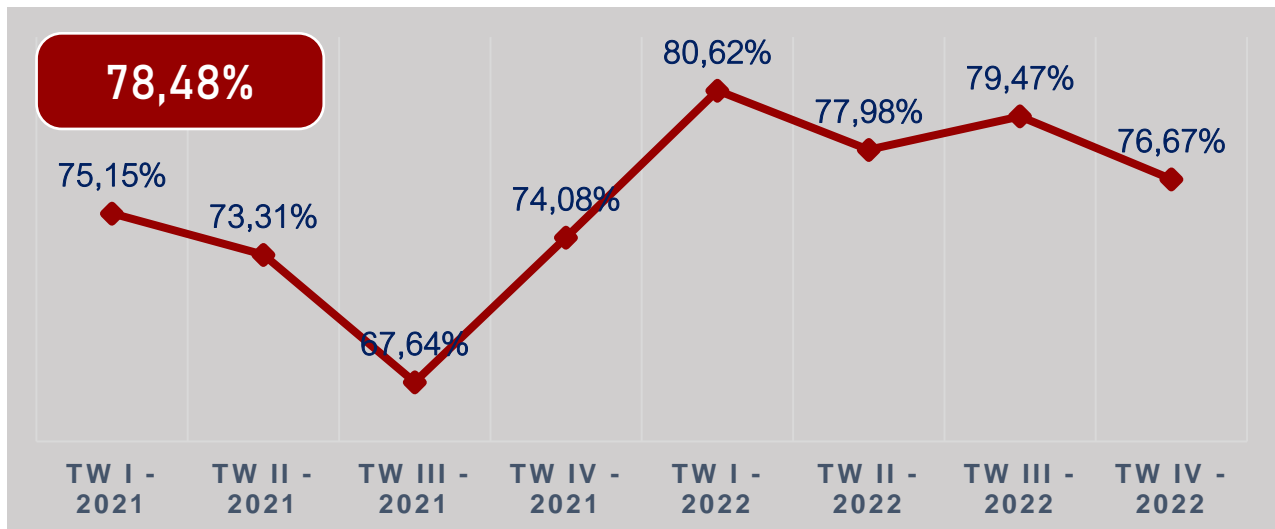
Gambar 3.4 sebaran responden

Di dalam survei tersebut, terdapat pertanyaan mengenai minat responden untuk menggunakan produk ber-SNI, menerapkan produk ber-SNI, memilih keduanya, maupun tidak memilih keduanya. Perhitungan minat penerapan SNI diperoleh dari presentase responden yang memilih 'Berminat Menerapkan' dan 'Berminat Menerapkan serta Menggunakan'. Formula yang digunakan untuk mengukur indikator ini adalah sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{ Responden yang menerapkan SNI}}{\sum \text{ Total responden}} \times 100\%$$

- Identifikasi jumlah responden yang menerapkan SNI
- Identifikasi total responden

Berdasarkan perhitungan keseluruhan responden sepanjang tahun, diperoleh 78,48% responden dari total 5.112 responden menyatakan berminat untuk menerapkan SNI.



Gambar 3.5 survei minat menerapkan sni tahun 2022 per triwulan

Berdasarkan pelaksanaan survei dan capaian kinerja survei minat menerapkan SNI tahun 2022 diperoleh informasi bahwa minat menerapkan SNI sudah lebih dari 70%, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali atas target yang telah ditetapkan.

Grafik di atas menunjukkan pemantauan capaian minat penerapan SNI dari responden yang diperoleh per triwulan dimana minat responden fluktuatif namun berada di kisaran capaian minat setahun yaitu 78,84%. Jika kita silangkan jawaban minat responden tersebut dengan jenis produk yang dihasilkan oleh responden, diperoleh hasil pada tabel berikut :

Produk yang dihasilkan	Barang	Jasa	Total
	(% from grand total)	(% from grand total)	
Berminat Menggunakan	84 (2,93%)	324 (11,29%)	408 (14,22%)
Berminat Menerapkan	277 (9,65%)	654 (22,79%)	931 (32,44%)
Berminat Menerapkan dan Menggunakan	482 (16,79%)	1049 (36,55%)	1531 (53,34%)
Total	843 (29,37%)	2027 (70,63%)	2870 (100%)

Tabel 14. Minat menerapkan sni berdasarkan jenis produk yang dihasilkan

Tabel di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar responden kita bergerak di bidang jasa dan berminat untuk menerapkan SNI serta berminat untuk menggunakan produk ber-SNI.

Persentase pelaku usaha binaan yang menjadi role model

Analisa Capaian Kinerja

Dalam meningkatkan penerapan SPK oleh pelaku usaha, Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian melakukan fasilitasi untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), industri dan organisasi. Capaian indikator persentase pelaku usaha binaan yang menjadi role model pada tahun 2022 tercapai 90 %, dari target 30% tercapai 27,8%. Pada tahun 2022, terdapat 212 UMKM yang dibina dan 80 organisasi dan industri yang dibina atau total sebanyak 292 pelaku usaha dan organisasi. Sedangkan pelaku usaha yang berhasil sertifikasi terdapat 59 UMKM, 27 organisasi dan industri atau total 86 pelaku usaha sehingga persentase pelaku usaha binaan yang menjadi role model tercapai 27,8%. Capaian dengan masa pandemik dan realokasi anggaran untuk penanganan dampak covid ini menjadi suatu prestasi yang luar biasa. Pencapaian ini salah satunya adalah kontribusidari berbagai partner yang ikut memfasilitasi biaya sertifikasi SNI, seperti Bank Indonesia, BUMN dan pemerintah daerah. Daftar UMKM yang difasilitasi sertifikasi SNI tahun 2022 seperti dalam Tabel dibawah ini

No	Nama	Produk	Propinsi
1	Rumah Batik Andalan	Batik Cap	Riau
2	Pathok	Kopi Bubuk	Jawa Timur
3	PT Rumah Makan Deltasari Indah	Rumah Makan	Jawa Timur
4	PT Gadih Minang Anugerah	Rendang Daging Sapi	Sumatera Barat
5	Koperasi Berkah Bersama Darul Mursyid	Kopi Bubuk	Sumatera Utara
6	CV. Pratama	Air Minreal	NTB
7	Rendang Uni Lili	Rendang daging sapi	Sumatera Barat
8	CV Butawarna Unit Desain	Produk Kerajinan	Jawa Timur
9	Madu Hutan Asli Sriwijaya	Madu	Sumatera Selatan
10	PT Triberg Wasser Indonesia	Air Demineral	Sulawesi Utara
11	CV Andias	Air Mineral	Sulawesi Selatan
12	Bambang Alianto Sulistijo	Pakaian Bayi	Jawa Timur
13	PT Hikmah Hijrah Bersama	Garam konsumsi beryodium	Jawa Barat
14	CV Adhyasta Perkasa	minyak goreng sawit	Jawa Barat
15	CV. Naya Abimantrana	Pakaian Bayi	Jawa Timur
16	Dapur Buweek	Keripik tempe	Sulawesi Selatan
17	CV. Yumeda Pangan Sejahtera	Es Krim	DI Yogyakarta

18	Koperasi Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis (MPIG) Garam Amed	Garam Konsumsi Beryodium	Bali
19	UD. Jaya Abadi	Minyak goreng Sawit	Jawa Timur
20	PT. Langkah Hijau Bersama	Organik	Riau
21	UKM Sari Rasa	bumbu pecel dan bumbu gado-gado	Jawa Timur
22	PT Portal Indonesia Group	Kopi Bubuk	Sumatera Selatan
23	Pempek Umi Abi	Pempek Ikan Rebus Beku	Sumatera Selatan
24	Nadina Salim	Kain Jumputan	Sumatera Selatan
25	Koperasi Kopi Cap Bukit Jempol Lahat	Kopi Bubuk	Sumatera Selatan
26	UMKM Rumah Lele	Abon Ikan	Sumatera Selatan
27	CV. Isfandari Group	Air Demineral	Sumatera Selatan
28	UKM Kopi Tanah Puyang	Kopi Bubuk	Sumatera Selatan
29	Pempek Mom & Khi	Pempek Ikan Rebus Beku	Sumatera Selatan
30	Pudot Craft	Kain Jumputan	Sumatera Selatan
31	Martien Liando-Jagadraye Coffee	Biji Kopi (Robusta dan Arabika)	Sumatera Selatan
32	IKM Putra Abadi	Kopi Bubuk	Sumatera Selatan
33	Kuliner Lemak Raso	Pempek ikan rebus beku	Sumatera Selatan
34	Terazz'Ibon Collection	Masker dari kain	
35	ELLAFROZE	Bakso Ikan	Jawa Tengah
36	Koperasi Pesantren Nurul Falaah	AMDK	Jawa Barat
37	Koperasi Koerintji Barokah Bersama	Kopi Bubuk	Sumatera Selatan
38	Project Mard	Pakaian Bayi	Sulawesi Selatan
39	Cemplik	Pakaian dalam wanita	Jawa Barat
40	CV. POKI CAHAYA ABADI	Kopi Bubuk	Sulawesi Barat
41	PT. Galang Smart Indonesia	Kopi Bubuk	Sulawesi Barat
42	PT Tirta Rifana Gowa	AMDK	Sulawesi Selatan
43	CV. FOREST COFFEE	Kopi Bubuk	Sulawesi Selatan
44	CV Putri Intan Kencana	Minuman Sari Buah	Jawa Barat
45	HNR Food	Rendang Daging Sapi	DI Yogyakarta
46	Rumah Mesin	Mesin Pertanian	DI Yogyakarta
47	Fatima Iskandar	Cokelat	Sulawesi Tengah
48	PT. Multi Klin Nusantara	Deterjen Serbuk	Sulawesi Selatan
49	CV. Siputri	Batik	Jawa Tengah
50	Hilwa Songket	TPT (Kain & Fashion)	Sumatera Utara
51	Nyalakok Tenun	TPT (Kain & Fashion)	NTB
52	Koperasi Tegal Manufactur Indonesia	Produk logam	Jawa Tengah

53	Rayya Sories	Tas Kulit	DI Yogyakarta
54	Creative Batik	TPT (Kain & Fashion)	DI Yogyakarta
55	Paradise Batik	Batik Cap, tulis, dan kombinasi	DI Yogyakarta
56	Kelompok Tani Margo Mulyo Menoreh	Kopi bubuk	DI Yogyakarta
57	PT AZAKI FOOD INTERNATIONAL	Tempe	Jawa Barat
58	CV. Ocean Water Tandoang	AMDK	Sulawesi Selatan
59	PRAMESTI MALIMA ENERGI FOKUS SEJAHTERA (PMEFS)	Abon Ikan	Kalimantan Tengah

Tabel 15. Daftar fasilitasi kepada umk dalam penerapan dan sertifikasi sni

Selain kepada UMK, pembinaan penerapan SNI juga dilakukan untuk kepada organisasi dan industri.

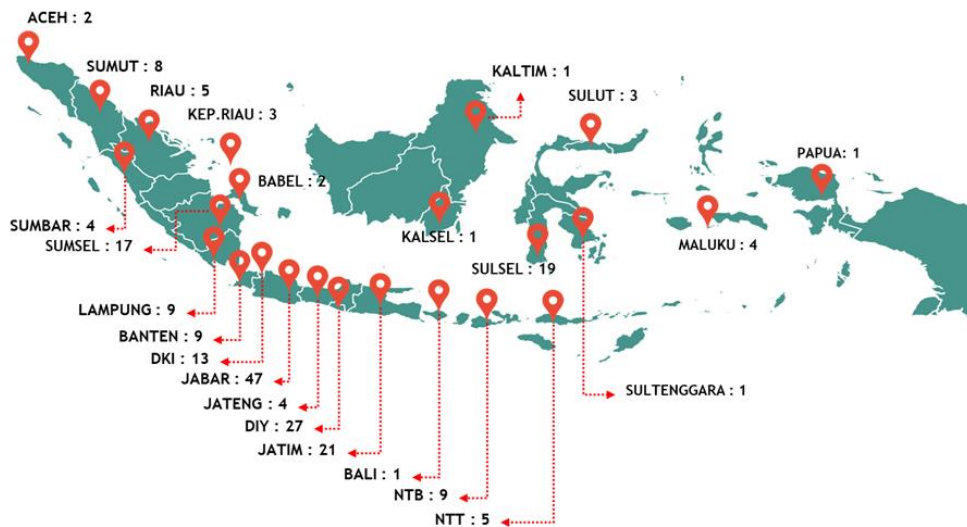
Pada tahun 2022, 27 organisasi dan industri yang didampingi berhasil sampai sertifikasi SNI (Tabel 16) Didominasi oleh penerap SNI Pasar Rakyat.

No	Organisasi/ Industri	Provinsi	Nomor SNI yang diterapkan	Judul
1	Bea Cukai Tj Priok	DKI Jakarta	SNI ISO 37001 : 2016	Sistem Manajemen Anti Penyipuan
2	Baristand Padang	Sumatera Barat	SNI ISO 37001 : 2016	Sistem Manajemen Anti Penyipuan
3	BBTKLPP Jakarta	DKI Jakarta	SNI 8340 :2016 / SNI ISO 35001 :2019	Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium
4	BBLK (Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta)	DKI Jakarta	SNI 8340 :2016 / SNI ISO 35001 :2019	Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium
5	Poltekkes Manado	Sulawesi Utara	SNI ISO 21001 :2018	Sistem Manajemen untuk Organisasi Pendidikan
6	Pasar Lembur Situ	Jawa Barat	SNI 8152 :2015 / 2021	Pasar Rakyat

7	Pasar Johar	Jawa Barat	SNI 8152 :2015 / 2021	Pasar Rakyat
8	Pasar Pasalaran	Jawa Barat	SNI 8152 :2015 / 2021	Pasar Rakyat
9	Pasar Sidarahayu	Jawa Barat	SNI 8152 :2015 / 2021	Pasar Rakyat
10	Pasar Dasan Agung	Nusa Tenggara Barat	SNI 8152 :2015 / 2021	Pasar Rakyat
11	Pasar Cisarua Bogor	Jawa Barat	SNI 8152 :2015 / 2021	Pasar Rakyat
12	PT Surya Mas Indobaja	Sulawesi Selatan	SNI 8399 :2017	Profil rangka Baja Ringan
13	DTW Candi Borobudur	DI Yogyakarta	SNI 9042 :2021	CHSE
14	BKKBN Banten	Banten	SNI ISO 37001 : 2016	Sistem Manajemen Anti Penyipuan
15	PT Selaras Alam Sejahtera	Jawa Tengah	SNI 7763 : 2018	Pupuk Organik Padat
16	Pasar Cicalengka	Jawa Barat	SNI 8152 :2015 / 2021	Pasar Rakyat
17	Pasar Soreang	Jawa Barat	SNI 8152 :2015 / 2021	Pasar Rakyat
18	PT. Triborg Wasser	Sulawesi Utara	SNI 6241 : 2015	Air Demineral
19	Manohara Resto	DI Yogyakarta	SNI 9042 :2021	CHSE
20	Pasar Prawirotaman	DI Yogyakarta	SNI 8152 :2015 / 2021	Pasar Rakyat
21	Itjen Kemendikbud	DKI Jakarta	SNI ISO 37001 : 2016	Sistem Manajemen Anti Penyipuan
22	BKKBN Sumatera Barat	Sumatera Barat	SNI ISO 37001 : 2016	Sistem Manajemen Anti Penyipuan
23	Perhutani - Rancaupas	Jawa Barat	SNI 8013 :2014	Pengelolaan Pariwisata Alam

24	Perhutani - Curug Cilember	Jawa Barat	SNI 8013 :2014	Pengelolaan Pariwisata Alam
25	Perhutani - Kawah Putih	Jawa Barat	SNI 8013 :2014	Pengelolaan Pariwisata Alam
26	Perhutani - Gn. Galunggung	Jawa Barat	SNI 8013 :2014	Pengelolaan Pariwisata Alam
27	Perhutani Dlundung	Jawa Barat	SNI 8013 :2014	Pengelolaan Pariwisata Alam

Tabel 16. Daftar organisasi/ industri yang mendapat sertifikat tahun 2022

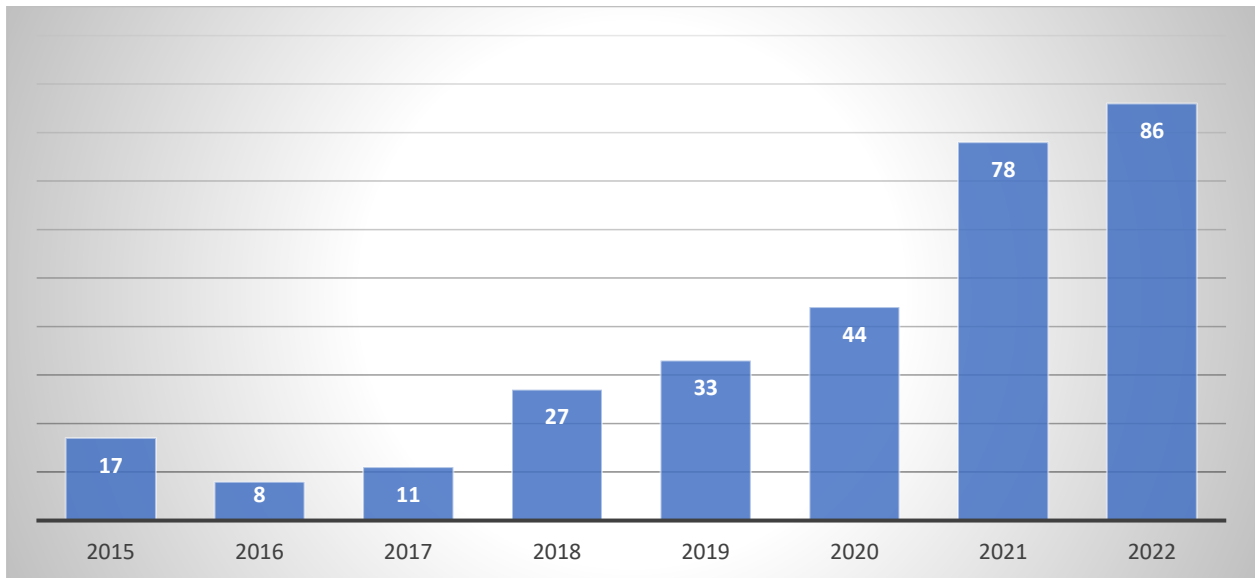


Gambar 3.6 sebaran organisasi dan industri tersertifikasi sni di 24 provinsi sampai dengan 2022

Untuk tercapainya Indikator Kinerja Persentase stakeholder yang menerapkan SNI dan Indikator Kinerja Persentase pelaku usaha binaan yang menjadi role model agar sesuai dengan target yang ditetapkan untuk tahun depan, Direktorat PPSPK perlu meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak terutama dalam pendampingan penerapan dan fasilitasi biaya sertifikasi SNI kepada UMKM. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah UMKM yang bersertifikasi melalui skema pembiayaan oleh mitra standardisasi. Selain itu, ToT kepada pendamping UMKM di wilayah terus dilakukan secara berkala sebagai bentuk mitigasi atas keterbatasan sumber daya yang dimiliki BSN, sehingga pendampingan penerapan SNI kepada UMKM lebih efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, jumlah pelaku usaha, industri, dan organisasi yang dibina mendapatkan sertifikasi pada tahun 2022 berjumlah 86. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Berikut ini ini grafik jumlah pelaku usaha, industri, dan organisasi yang tersertifikasi dari tahun 2015-2022



Gambar 3.7 jumlah pelaku usaha yang fasilitas sertifikasi sni 2015-2022



Meningkatnya ketersediaan LPK

Dalam rangka meningkatkan daya saing sektor usaha (industri unggulan) dan produk unggulan daerah, BSN melaksanakan pengembangan infrastruktur mutu berupa lembaga penilaian kesesuaian yang ada di daerah. Keberadaan LPK yang dengan dengan pelaku usaha dan produsen produk unggulan daerah, diharapkan mampu menekan biaya sertifikasi/pengujian produk, sehingga tidak harus ke luar daerah untuk mendapatkan layanan sertifikasi/pengujian produknya

Capaian Kinerja ini diukur melalui Rasio LPK terhadap sector usaha dan Rasio LPK terhadap produk Unggulan Daerah, sebagaimana tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Capaian 2022			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2021	Target	Realisasi	% *)	Target 2024	% capaian
1. Rasio LPK terhadap sektor Usaha	Rasio	0.71	0.51	0.71	139%	0.6	118,0%
2. Rasio LPK terhadap Produk Unggulan daerah	Rasio	0.78	0.60	0.87	145%	0.7	124%

Tabel 17. Capaian kinerja sasaran 4

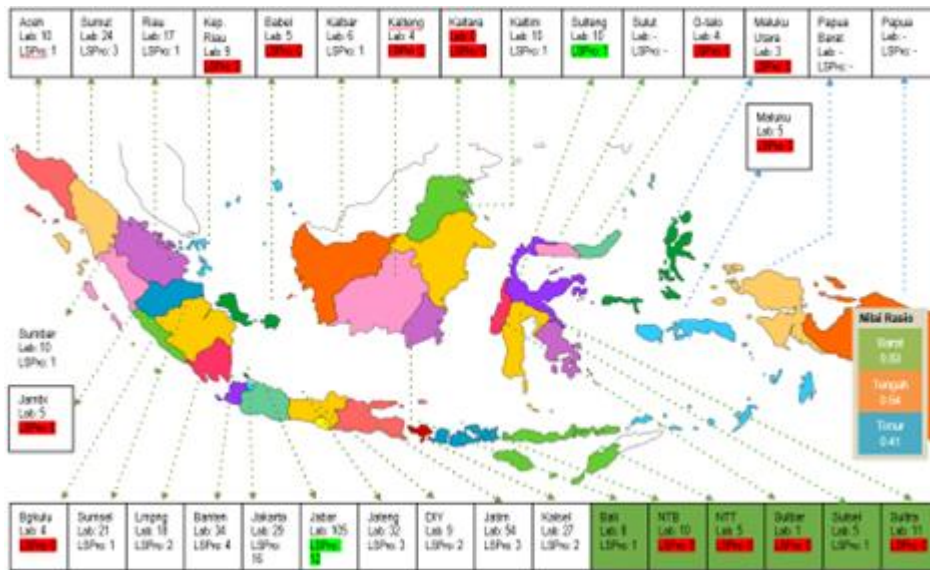
Kedua Indikator kinerja ini untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatnya ketersediaan LPK. Terkait hal ini target kinerja sudah tercapai 100% dengan rasio LPK terhadap sektor usaha sebesar 0,71 dan rasio LPK terhadap produk unggulan daerah 0,87. Perhitungan rasio diperoleh dengan membandingkan jumlah LPK yaitu Lembaga yang melakukan kegiatan penilaian kesesuaian yang terdiri atas laboratorium, lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga verifikasi/validasi dengan jumlah sektor (2 digit) yang ditetapkan dalam Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI). Dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio IK SK 4.1} = \frac{\text{Jumlah LPK}}{\text{Sektor Usaha}}$$

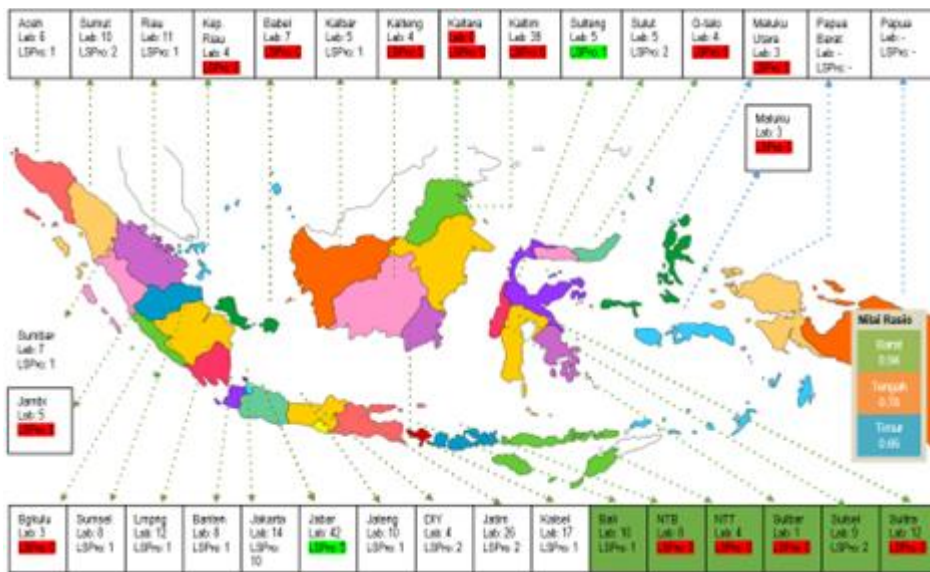
Dimana jumlah LPK tersebut merupakan jumlah LPK yang terakreditasi oleh KAN, sedangkan sektor usaha yang dimaksud mengacu pada KBLI yang ditetapkan oleh BPS sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020. Dari 99 sektor KBLI dikecualikan 5 sektor yaitu sektor 4, 67, 76, 83, dan Sektor 92, sehingga jumlah sektor yang dihitung ada 94 sektor.

Perhitungan rasio diperoleh dari jumlah LPK yaitu Lembaga yang melakukan kegiatan penilaian kesesuaian yang terdiri lembaga sertifikasi produk dan laboratorium pengujian guna mendukung penerbitan SPPT-SNI dibandingkan dengan Jumlah barang atau jasa yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu daerah, yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan pertimbangan kelayakan teknis (bahan baku dan pasar), talenta masyarakat dan lain-lain. Dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio IK SK 4.2} = \frac{\text{Jumlah LPK}}{\text{Jumlah Produk Unggulan daerah}}$$



Gambar 3.8 peta sebaran lpk dalam mendukung sektor usaha



Gambar 3.9 peta sebaran lpk dalam mendukung produk unggulan daerah

Dalam upaya untuk meningkatkan rasio ketersediaan LPK guna mendukung kebutuhan sektor usaha dan produk unggulan daerah, pada tahun 2022 Direktorat PPSPK telah melakukan fasilitasi terhadap 33 LPK yang meliputi 17 Laboratorium dan 16 Lembaga sertifikasi/lembaga inspeksi, yang tersebar di provinsi DI Yogyakarta, Maluku Utara, Lampung, Gorontalo, Bali, Sumatra Utara, DI Aceh, Jambi, DKI Jakarta,

Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.

Pelaksanaan fasilitasi juga bermitra dengan Kementerian, Lembaga Pemerintah di pusat dan daerah, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Angkatan Darat, POLRI, BSSN, PLN, Unit pelaksana teknis daerah, perguruan tinggi dan swasta. Adapun SNI yang diterapkan dalam proses pembinaan LPK tersebut meliputi SNI ISO/IEC 17025:2017, SNI ISO/IEC 17065:2012, SNI ISO/IEC 17020:2012, SNI ISO/IEC 17043:2010, SNI ISO/IEC 17021-1:2015, SNI ISO/IEC 17029:2019.



Gambar 3.10 peta sebaran fasilitasi lpk th 2022

Pada Tabel 16 berikut adalah Laboratorium pengujian dan Laboratorium kalibrasi yang difasilitasi selama tahun 2022

No	<u>Nama Lembaga</u>	<u>Skema</u>	<u>Ruang Lingkup</u>
1	UPN Veteran Yogyakarta	LP	Batu Bara
2	Poltekkes Kemenkes Ternate	LP	Air bersih dan Air permukaan

3	Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang	LP	Air Bersih, Air minum dan Air Limbah
4	UPTD BPMKP Provinsi Lampung	LP	Beras
5	BPMJB Dinas PUPR Prov. Gorontalo	LP	Konstruksi Bahan dan Jalan
6	FKIK Universitas Warmadewa	LP	Biologi Molekuler
7	Poltekkes Kemenkes Medan	LP	Lingkungan dan Pangan
8	Poltekkes Kemenkes Semarang	LP	Radiologi
9	Poltekkes Kemenkes Bandung	LP	Air Untuk Keperluan Sanitasi dan Hygiene
10	Poltekkes Kemenkes Yogyakarta	LP	Air Untuk Keperluan Sanitasi dan Hygiene
11	Poltekkes Kemenkes Surabaya	LP	Air dan Daging
12	Poltekkes Kemenkes Banjarmasin	LP	Air Bersih dan Udara
13	Poltekkes Kemenkes Malang	LP	Uji Proksimat pada makanan
14	Poltekkes Kemenkes Manado	LP	Air bersih dan Air Limbah
15	Puslitbang Mabes POLRI	LP	Senjata dan alat Pelindung diri
16	BPSMB Prov. Maluku Utara	LP	Lada dan Pala
17	Lapalkes Puskes AD	LK	Alat Kesehatan

Tabel 18. 10 laboratorium yang difasilitasi

Pada Tabel III.11 kami rincikan Lembaga Sertifikasi dan Lembaga Inspeksi yang difasilitasi selama tahun 2022

<u>No</u>	<u>Nama Lembaga</u>	<u>Skema</u>	<u>Ruang Lingkup</u>
1	BPSMB Prov. Aceh	LSPro	Bubuk Kopi, AMDK
2	BPSMB Prov. Jambi	LSPro	SIR, AMDK, Kopi Instan dan Biji Kopi
3	Badan Siber dan Sandi Negara	LSPro	Modul Sandi dan Keamanan Perangkat Teknologi Informasi
4	BPPI – Kementerian Kelautan dan Perikanan	LSPro	Benang Polyamide (PA) monofilament untuk alat Penangkapan
5	BPSMB Prov. Kalimantan Timur	LSPro	Pasar Rakyat
6	BPSMB Prov. Kalimantan Selatan	LSPro	SIR
7	BPSMB Prov. Kalimantan Barat	LSPro	SIR, Pasar Rakyat
8	BPSMB Prov. Bali	LSPro	Pasar Rakyat
9	BPSMB Prov. Kalimantan Tengah	LSPro	SIR
10	UPT PSHP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Jawa Timur	LSO	Tanaman segar dan produk tanaman; Produk khusus

11	Balai Besar Karet Kulit dan Plastik Yogyakarta	LI	Lingkungan Kerja industri karet, kulit dan plastik untuk (1) Pencahayaan, (2) Nilai Ambang Batas Iklim Indeks Suhu Basah dan (ISBB), (3) Kebisingan, (4) Getaran, (5) Partikulat, (6) Kebauan.
12	PT SKI	LSBU	Jasa Konstruksi
13	PT Inkindo	LSBU	Jasa Konstruksi
14	PT BMR	LSBU	Jasa Konstruksi
15	BBSPJIHPMM Makassar	LSSM	Alsintan
16	PT PLN Pusertif	LVV GRK	Gas Rumah Kaca

Tabel 19. Lembaga sertifikasi/lembaga inspeksi yang difasilitasi

Pada tahun 2022, juga terdapat 5 (lima) Lembaga Penilaian Kesesuaian yang merupakan binaan BSN yang telah mendapatkan akreditasi dari KAN. Adapun kelima lembaga tersebut adalah

1. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi (LSPR-085-IDN)
2. Balai Perikanan Budidaya Air Payau (LSPR-087-IDN)
3. UPT PSMB Provinsi Sulawesi Tengah (LSPR-131-IDN)
4. Pusat Laboratorium Narkotika BNN (PUP-033-IDN)
5. Laboratorium Terpadu Universitas Negeri Padang (LP-1641-IDN)

Sementara itu, 10 Lembaga penilaian kesesuaian yang saat sedang dalam proses akreditasi KAN. LPK tersebut diantaranya :

1. Laboratorium pengujian Puslitbang Polri
2. Laboratorium Terpadu Poltekes Kemenkes Kupang
3. Laboratorium Terpadu Poltekes Kemenkes Semarang
4. Laboratorium pengujian BPMJB Gorontalo

5. Laboratorium kalibrasi Lapalkes Puskes AD
6. Lembaga Sertifikasi Organik Jawa Timur
7. Lembaga Sertifikasi Organik Jawa Tengah
8. Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Inkindo
9. Lembaga Sertifikasi PT SKI

Dalam rangka meningkatkan keberterimaan LPK sektor kelistrikan di ASEAN, direktorat PPSPK juga berpartisipasi aktif dalam forum *Joint sectoral Committee on electrical Electronic Equipment (JSC EEE)* di ASEAN serta memberikan tanggapan dan melaksanakan *listing* terhadap laboratorium dan Lembaga sertifikasi produk di forum ASEAN. Adapun Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji yang telah ter-listing sebagaimana tercantum pada tabel 18 berikut

No.	Nama LPK	Masa Listing	Masa Grace Period	Kondisi Terupdate	Negara Tujuan Listing
Lembaga Sertifikasi Produk (Certification Body)					
1.	PPMB	6 Maret 2019 – 5 Maret 2022	4 September 2022	Proses re-akreditasi	Brunei Darussalam, Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Vietnam
2.	Sucofindo ICS	23 September 2020 – 22 September 2023			Brunei Darussalam, Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thailand, Vietnam
3.	PT Qualis Indonesia	17 Desember 2019 - 16 Desember 2022	15 Juni 2023	Masa kontestasi	Brunei Darussalam, Cambodia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam

4.	PT. UL International Indonesia	15 Maret 2021 – 14 Maret 2024			Brunei Darussalam, Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thailand, Vietnam
5.	TUV Nord Indonesia	Pengajuan baru		Kontestasi dengan Thailand	

No.	Nama LPK	Masa Listing	Masa Grace Period	Kondisi Terupdate	Negara Tujuan Listing
Laboratorium Penguji (Testing Laboratory)					
1.	BPMB	22 Juli 2020 – 21 Juli 2023			Brunei Darussalam, Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam
2.	B4T	12 Februari 2019 – 11 Februari 2022	10 Agustus 2022	Proses analisis listing regulasi negara tujuan	
3.	PT. Sucofindo Laboratory	22 Juli 2020 – 21 Juli 2023			Cambodia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam
4.	PT. UL International Indonesia	15 Maret 2021 – 14 Maret 2024			Brunei Darussalam, Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Thailand, Vietnam
5.	PT. Qualis Indonesia	5 April 2022 – 4 April 2025			Brunei Darussalam, Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam

6.	PT. Hartono Istana Teknologi	5 April 2022 – 4 April 2025			Brunei Darussalam, Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam
----	------------------------------	-----------------------------	--	--	--

Tabel 20. Ruang lingkup listing lpk indonesia

SASARAN
V

Meningkatnya Kualitas Layanan SPK di wilayah KLT

- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di wilayah KLT

Dalam memperluas penyebaran informasi dan pembinaan SPK kepada stakeholder, BSN membentuk Kantor Layanan Teknis di 5 wilayah, yaitu Sulawesi Selatan Sumatera Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat dan Riau. Layanan KLT meliputi penyediaan informasi SPK, konsultasi, pelatihan SPK, pendampingan penerapan SNI kepada pelaku usaha baik organisasi, usaha mikro kecil, menengah dan industri besar dan juga peningkatan kompetensi SDM LPK di daerah. Dalam melakukan pembinaan SPK tersebut, personel KLT berkolaborasi dengan berbagai unsur stakeholder. Untuk melihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan KLT, Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian melakukan survei untuk mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif maupun kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Kantor Layanan Teknis yang ada di 5 Wilayah dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Capaian Kinerja terkait IKM ini disajikan dalam tabel 19 berikut.

Untuk menghitung capaian kinerja ini, digunakan formula sebagai berikut :

$$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Layanan KLT per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian 2022			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)
		2021	Target	Realisasi	% *)	Target 2024
1. <i>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di wilayah KLT</i>	Nilai	-	3,6	3.73	103%	3,8

2. Persentase KLT dengan IKM minimal 3	%	-	80%	100%	100%	100%
--	---	---	-----	------	------	------

Tabel 21. Capaian kinerja sasaran 5

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran *Meningkatnya Kualitas Layanan SPK di wilayah KLT* terbagi menjadi dua indikator, yaitu *Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di wilayah KLT* dan *Persentase KLT dengan IKM minimal 3*. Capaian kinerja untuk indikator *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di wilayah KLT* yaitu sebesar 103% dan untuk indikator kinerja *Persentase KLT dengan IK minimal 3* dengan capaian sebesar 100%.

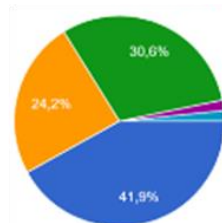
Kegiatan survei IKM diinisiasi sejak tahun 2021. Adapun kriteria pertanyaan dalam melakukan penilaian IKM tersebut yaitu diantaranya adalah :

- (1) kecepatan pelayanan,
- (2) keramahan petugas KLT,
- (3) kompetensi petugas KLT, dan
- (4) layanan pembinaan yang dilakukan.

Berikut ini hasil survey dari Indeks Kepuasan Masyarakat dari 5 Wilayah Kantor Layanan Teknis:

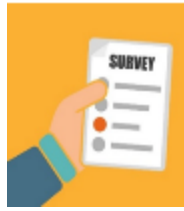
1. KLT Sumatera Selatan

Survey IKM 3,84 86 responden



Kelompok Pengguna

- UMKM
- Industri
- Pemerintah
- Pendidikan (dosen/mahasiswa/siswa)
- Konsumen (masyarakat umum)
- Lembaga Penilaian Kesesuaian
- Anggota Komite Teknis/Subkomite Teknis



Skor penilaian:
1 : Sangat tidak puas
2 : Tidak puas
3 : Puas
4 : Sangat puas

Layanan Konsultasi sesuai Harapan = 3,84
Keramahan petugas KLT = 3,9
Kecepatan Pelayanan KLT = 3,8
Kompetensi petugas KLT = 3,8

Gambar 3.11 survey ikm klt sumatera selatan

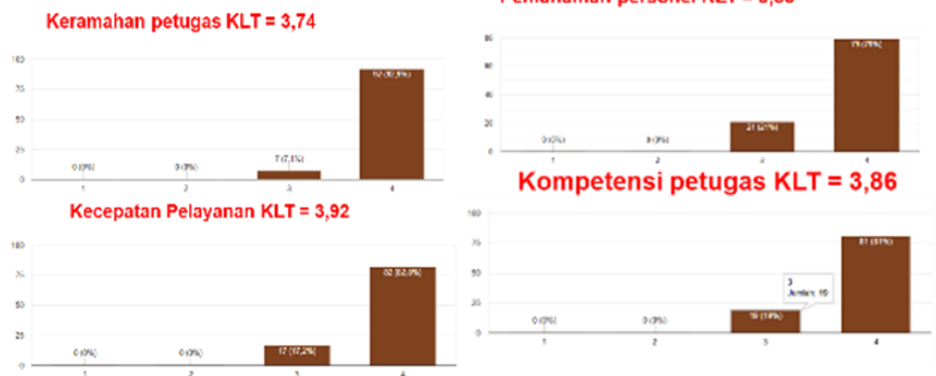
Hasil Survey IKM untuk KLT Sumatera Selatan sebesar 3,84 yang menunjukkan akan kepuasan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sangat baik.

2. KLT Riau

Survey IKM : 3,83



129



Gambar 3.12 survey ikm klt riau

Hasil Survey IKM untuk KLT Riau sebesar 3,85 yang menunjukkan akan kepuasan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sangat baik, dengan jumlah responden sebanyak 129 orang.

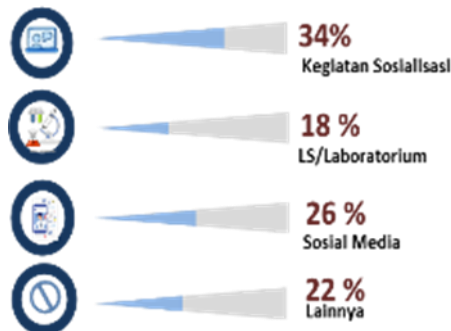
3. KLT Jawa Barat



IKM : 3.69



100



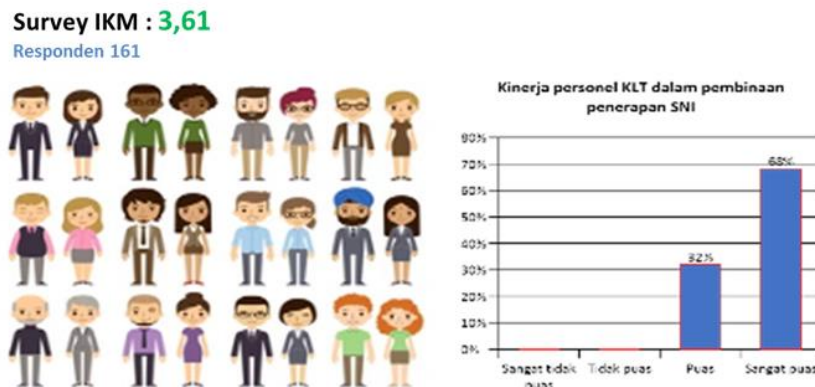
Saran Untuk KLT BSN Jawa Barat

- Perbanyak kunjungan ke kampus
- Lebih banyak sosialisasi langsung ke UMKM
- Sering melakukan sosialisasi SPK ke Daerah
- Menambah personil

Gambar 3.13 survey ikm klt jawa barat

Hasil Survey IKM untuk KLT Jawa Barat sebesar 3,69 yang menunjukkan akan kepuasan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sangat baik, namun nilai tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

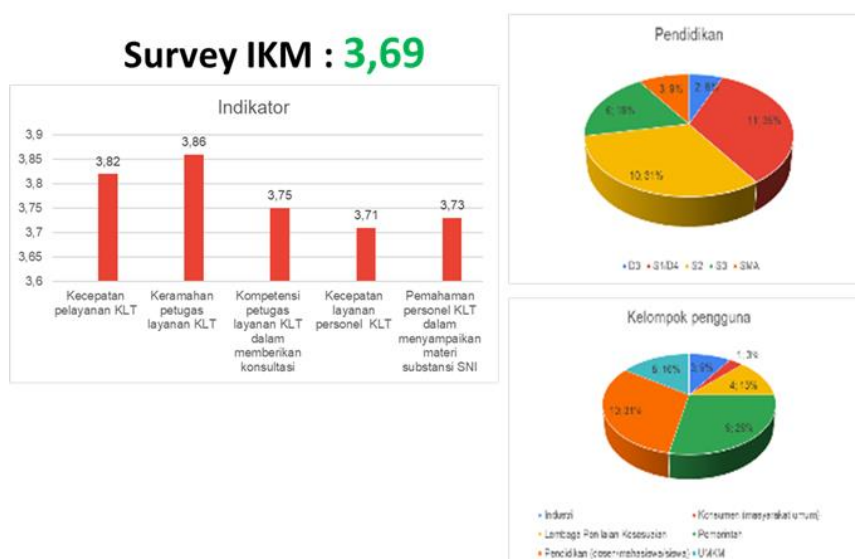
4. KLT Jawa Timur



Gambar 3.14 survey ikm klt jawa timur

Hasil Survey IKM untuk KLT Jawa Timur sebesar 3,61 yang menunjukkan akan kepuasan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terbilang sangat baik.

5. KLT Sulawesi Selatan



Gambar 3.15 survey ikm klt sulawesi selatan

Hasil Survey IKM untuk KLT Sulawesi Selatan sebesar 3,69 yang menunjukkan akan kepuasan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sangat baik.

- Persentase KLT dengan IK minimal 3

Indikator kinerja Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di 5 wilayah KLT pada tahun 2022 yaitu pada nilai 3,73. Target capaian Tahun 2022 dengan presentasi KLT dengan IKM minimal 3 adalah 80%. Berdasarkan Tabel 22. Rekapitulasi Survei IKM KLT BSN di 5 Wilayah 2021 vs 2022 menunjukkan nilai lebih dari 3 seperti yang ditargetkan sehingga menunjukkan bahwa IKU tersebut tercapai dengan persentase capaian sebesar 100%.

No	KLT	IKM (2021)	IKM (2022)	Keterangan
1	Sumatera Selatan	3,83	3,84	Naik
2	Riau	3,66	3,85	Naik
3	Jawa Barat	3,85	3,69	Turun
4	Jawa Timur	3,54	3,61	Naik
5	Sulawesi Selatan	3,56	3,69	Naik

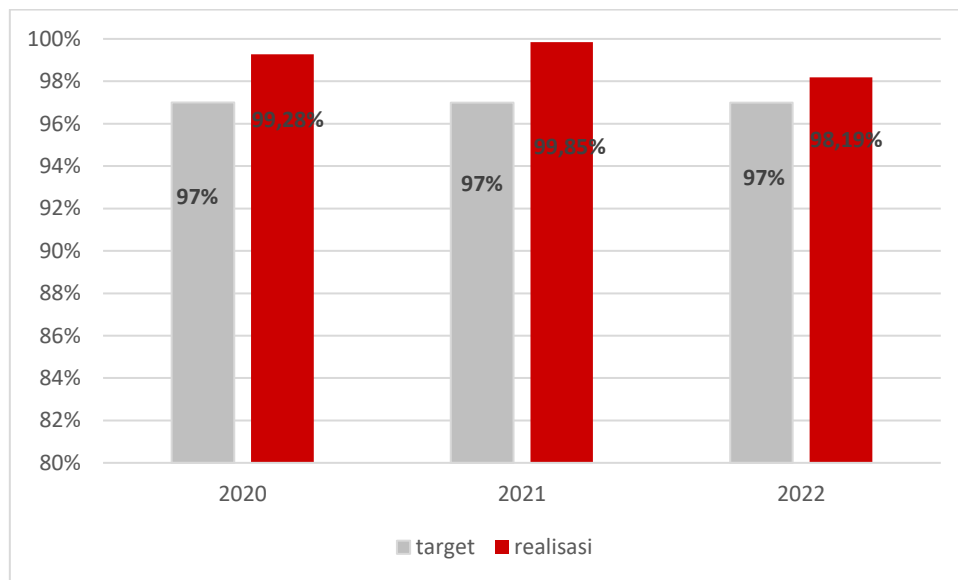
Tabel 22. Rekapitulasi survei ikm klt bsn di 5 wilayah 2021 vs 2022

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa terjadi penurunan IKM untuk KLT Jawa Barat sebesar 0,16 dari tahun 2021 vs 2022. Namun, hal ini tidak mempengaruhi target rata-rata keseluruhan yang ditetapkan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan stakeholder terhadap pelayanan yang diberikan KLT sangat tinggi. Kepuasan tersebut memberikan kontribusi terhadap kinerja KLT yang dinilai sangat baik. Dengan capaian ini menunjukkan bahwa kinerja personel KLT dalam melayani SPK kepada stakeholder masuk kategori sangat baik. Tentu ada beberapa masukan dalam pelaksanaan survei yang bisa ditindaklanjuti oleh masing-masing KLT sesuai dengan kebutuhan stakeholder wilayah. Masukan dari stakeholder diharapkan dapat direalisasikan sehingga capaian indeks kepuasan masyarakat semakin baik untuk kedepannya.

**SASARAN
VI**

Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran



Gambar 3.16 grafik perbandingan dan capaian 3 tahun terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Capaian 2021			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2021	Target	Realiasi	% *)	Target 2024	% capaian
Persentase Realisasi anggaran Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	%	99,85	>97%	98,19%	101,2%	100%	100 %

Tabel 23. Capaian kinerja sasaran 6

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran terdiri dari 1 (Satu) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator Persentase realisasi anggaran Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dengan capaian sebesar 101,2% terhadap target. Untuk mendukung kinerja yang diperjanjikan telah disusun Rincian Output (RO) kegiatan di Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dengan besaran alokasi anggarannya. Anggaran yang

telah dialokasikan pada setiap RO diharapkan dapat dioptimalkan untuk pencapaian target RO sesuai yang direncanakan. Formula pengukuran capaian persentase realisasi anggaran adalah dengan membandingkan realisasi anggaran dengan pagu anggaran yang tersedia di kali 100%.

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01-0/2021 tanggal 30 November 2021, pagu anggaran TA 2022 Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian adalah sebesar Rp 7.100.500.000,- PAGU tersebut telah mengalami dua kali *automatic adjustment* belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 1.487.113.000, sehingga menjadi Rp 5.613.387.000 dan terealisasi sebesar Rp 5.511.908.849. Pencapaian realiasi anggaran ini telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 98,19% atau dengan persentase capaian sebesar 98,19% terhadap target 100%. Presentase realisasi anggaran ini mengalami penurunan sebesar 1,7% dibandingkan tahun 2021 dimana saat itu mencapai 99,85%.

III.2 Capaian Kegiatan

Pencapaian kinerja Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian tidak lepas dari capaian Rincian Output (RO) di Unit Kerja. Adapun realisasi dari RO disampaikan sebagai berikut:

Kode RO	Nomenkatur	Target RO 2022	Realisasi RO 2022	%
3558.AEB.001	Sidang ISO Devco	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
3558.AEF.001	Promosi Standar dan Penilaian Kesesuaian	9500 orang	9500 orang	100%
3558.BDB.001	Kesekretariatan DB JSCEEE	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
3558.BDD.001	Bimbingan Teknis kepada Kelompok Masyarakat	12 pokmas	12 pokmas	100%
3558.BDH.001	Bimbingan teknis kepada Badan Usaha	60	68	113,33%
3558.PEF.001	Sosialisasi kepada Penerap Standar Nasional Indonesia	3000 orang	4000	133,33%
3558.QAH.001	Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Surabaya	1 layanan	1 layanan	100%
3558.QAH.003	Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Jawa Barat	1 layanan	1 layanan	100%

3558.QAH.005	Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Riau	1 layanan	1 layanan	100%
3558.QAH.007	Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Palembang	1 layanan	1 layanan	100%
3558.QAH.009	Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Makassar	1 layanan	1 layanan	100%
3558.QDB.001	Bimbingan teknis kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian	30 lembaga	30 lembaga	100%
3558.QDG.001	Bimbingan teknis kepada UMKM	200 UMKM	201 UMKM	100,50%

Tabel 24. Realisasi dari rincian output

III.3 Realisasi Anggaran

Berdasarkan DIPA induk BSN Nomor SP DIPA-084.01-0/2021 tanggal 30 November 2021, pagu awal Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian TA 2022 adalah sebesar Rp 7.100.500.000,- dan pagu telah direvisi dan mengalami *Automatic Adjustment* belanja Kementerian/Lembaga sampai akhir tahun 2022 menjadi Rp 5.613.387.000,- dengan realisasi sebesar Rp 5.511.908.849,- atau mencapai 98,19%. Adapun pagu dan realisasi anggaran Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian TA 2022 per KRO/RO dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Kode RO	Nomenklatur	Target RO 2022	Realisasi RO 2022	%
3558	Peningkatan Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	5.613.387.000	5.511.908.949	98,19%
3558.AEB.001	Sidang ISO Devco	1.050.000	1.035.000	98,57%
3558.AEF.001	Promosi Standar dan Penilaian Kesesuaian	477.339.000	476.979.042	99,92%
3558.BDB.001	Kesekretariatan DB JSCEEE	2.591.000	2.582.370	99,67%
3558.BDD.001	Bimbingan Teknis kepada Kelompok Masyarakat	148.245.000	146.733.172	98,98%
3558.BDH.001	Bimbingan teknis kepada Badan Usaha	151.352.000	149.752.316	98,94%
3558.PEF.001	Sosialisasi kepada Penerap Standar Nasional Indonesia	1.052.373.000	1.049.883.914	99,76%
3558.QAH.001	Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Surabaya	391.991.000	387.017.491	98,73%

3558.QAH.003	Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Jawa Barat	417.588.000	411.332.059	98,50%
3558.QAH.005	Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Riau	330.162.000	327.833.219	99,29%
3558.QAH.007	Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Palembang	393.305.000	370.707.155	94,25%
3558.QAH.009	Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Makassar	392.948.000	383.000.522	97,47%
3558.QDB.001	Bimbingan teknis kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian	532.255.000	529.781.411	99,54%
3558.QDG.001	Bimbingan teknis kepada UMKM	1.322.188.000	1.275.271.178	96,45%

Tabel 25. Pagu dan realisasi anggaran direktorat penguatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian T.A. 2022

Analisa Sumber Daya

Dalam rupiah

Dengan keterbatasan sumber daya, maka pada tahun 2022 Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah melakukan efisiensi sumber daya antara lain:

1. Efisiensi dalam melakukan pembinaan penerapan SNI kepada organisasi, pelaku UMKM dan industri, serta Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi, sehingga dilakukan dengan virtual tanpa perlu biaya akomodasi dan transportasi
2. Efisiensi dalam melakukan diseminasi SPK dengan menggunakan virtual meeting dan partnership dengan berbagai pihak untuk menekan biaya penyelenggaraan acara.
3. Membuat materi promosi dan panduan penerapan SNI kepada pelaku usaha dalam bentuk digital sehingga tidak perlu ada biaya pencetakan
4. Melakukan partnership dengan berbagai institusi Pembina UMKM seperti Bank Indonesia, BUMN dan stakeholder lain sehingga biaya sertifikasi SNI kepada UMK bersumber dari mitra BSN

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2022 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2022 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2022, seluruh kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan 6 (enam) sasaran dan 10 (Sepuluh) indikator kinerja. Sasaran dan indikator kinerja tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan Program Standardisasi Nasional yang diamanatkan kepada Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian. Dari 10 (Sepuluh) indikator kinerja di Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, seluruh indikator kerja telah mencapai target.

Dengan *refocusing* maupun "*automatic adjustment*" anggaran untuk penanganan dampak covid, Direktorat PPSPK juga telah melakukan banyak inovasi dan efisiensi dalam pengelolaan kegiatan sehingga target tercapai meskipun dengan anggaran yang sangat terbatas. Inovasi tersebut dilakukan dengan melakukan terobosan penggunaan IT dalam pembinaan pelaku usaha dan lembaga penilaian kesesuaian, serta diseminasi SPK, membuat e-panduan dan video promosi SPK yang memudahkan masyarakat dan pelaku usaha. Direktorat PPSPK juga berkolaborasi dengan berbagai mitra kerja guna memberikan fasilitasi pembiayaan dalam sertifikasi SNI juga dalam pembinaan dan pengembangan LPK di daerah

Untuk meningkatkan kinerja ke depan, Direktorat PPSPK akan terus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, menggalakkan penyusunan materi promosi dan pembinaan yang mudah dipahami oleh pelaku usaha terutama UMKM dalam bentuk digitalisasi materi dan juga menindaklanjuti pembinaan SNI Bina UMK melalui aplikasi SNI Bina UMK. Upaya pembinaan SPK secara genjar dan massif ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk nasional Indonesia di kancah nasional maupun global. Hal ini searah dengan visi pemerintah untuk terwujudnya Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Sebagai informasi bahwa pada tahun 2023 terdapat perubahan pada sasaran kerja Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, meliputi : 6 (enam)

sasaran dan 12 (dua belas) indikator kinerja, dimana terdapat perubahan signifikan dalam indikator kinerja yang mesti dicapai pada tahun 2023 mendatang

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2021
1) Meningkatnya produk, sistem, personel, jasa, dan proses sesuai dengan SNI	1) Persentase peningkatan produk, sistem, personel, jasa dan proses yang berSNI	10 %
2) Meningkatnya SNI yang diterapkan	2) Persentase SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha , organisasi dan LPK	40%
	3) Persentase pertumbuhan SNI yang diterapkan	15 %
3) Meningkatnya penerapan standar dan penilaian kesesuaian	4) Persentase stakeholder yang menerapkan SNI	40 %
	5) Persentase pelaku usaha binaan yang menjadi role model	20%
4) Meningkatnya ketersediaan LPK	6) Rasio LPK terhadap sektor Usaha	0.73
	7) Rasio LPK terhadap Produk Unggulan daerah	0.78
5) Meningkatnya Kualitas Layanan SPK di wilayah KLT	8) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di wilayah KLT	3.5
	9) Persentase KLT dengan IK minimal 3	60
6) Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran	10) Persentase realisasi anggaran Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	>97%

Tabel 26. Tabel perjanjian kinerja direktorat penguatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian tahun 2022